



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kebijakan Transportasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kebijakan Transportasi sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang kebijakan transportasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 berisikan program dan kegiatan analisis kebijakan yang dilaksanakan selama Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun Anggaran 2022. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Kebijakan Transportasi pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dapat meningkatkan kinerja Badan Kebijakan Transportasi di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA., CGCAE.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196307171989031002

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI		
2	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI		
3	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA		
4	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN		
5	PLH. KEPALA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022**" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kebijakan Transportasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kebijakan Transportasi sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang kebijakan transportasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 berisikan program dan kegiatan analisis kebijakan yang dilaksanakan selama Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai Badan Kebijakan Transportasi selama Tahun Anggaran 2022. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Kebijakan Transportasi pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dapat meningkatkan kinerja Badan Kebijakan Transportasi di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



Dr. GEDE PASEK SUARDIKA, M.Sc., QGIA., CGCAE.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196307171989031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2022, Badan Litbang Perhubungan mempunyai perubahan orientasi pekerjaan menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Guna mendukung visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, Badan Kebijakan Transportasi hadir sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan responsive.

Dalam perumusan rekomendasi kebijakan, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai Sumber Daya Manusia yang terdiri dari berbagai macam aspek kepakaran. Pada bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 258 pegawai, yang terdiri dari 128 kepakaran tertentu, dan sisanya adalah pejabat fungsional umum.

Sebagai unit kerja yang ditunjuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan analisis kebijakan transportasi, Badan Kebijakan Transportasi sesungguhnya memiliki potensi cukup besar untuk mengkoordinasikan/ mengkonsolidasikan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dukungan analisis kebijakan di lingkungan internal Kementerian Perhubungan.

Selama proses transisi, Rencana Strategis Kebijakan Transportasi masih menggunakan Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor 145 Tahun 2020.

Secara umum, Sasaran Program 1 Badan Kebijakan Transportasi telah tercapai, khususnya di IKP 1 *intermediate outcome* dan IKP 3 *intermediate outcome*. Adapun untuk IKP yang lain pada SP.1 tidak dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan kegiatan penelitian telah beralih ke BRIN.

Sasaran Program 2 Badan Kebijakan Transportasi telah tercapai. Kedepan, IKP ini tidak dapat dicantumkan dalam RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi, dikarenakan adanya perubahan proses bisnis yang semula berorientasi hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan.

Pada Sasaran Program 3, Target Indeks RB tahun 2022 sebesar 79,5 dengan realisasi Indeks RB tahun 2021 yaitu 79,20, jika dibandingkan dengan target indeks RB Tahun 2021 maka realisasi indeks RB Tahun 2021 sama dengan target, sedangkan jika dibandingkan dengan target indeks RB Tahun 2022 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,623 %. Saat ini, indeks RB Tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PANRB dan hasil indeks RB tersebut baru akan disampaikan pada tahun 2023 sehingga sampai untuk sementara nilai capaian kinerja indeks RB menggunakan capaian indeks RB tahun sebelumnya.

Dari IKP yang dapat dihitung, diperoleh capaian kinerja Badan kebijakan Transportasi Tahun 2022 sebesar **122,839%**. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja Badan Kebijakan Transportasi telah mencapai target.

Dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja Badan Kebijakan Transportasi pada Tahun 2022, telah terealisasi anggaran sebesar 99,97% atau senilai Rp97.096.874.442,00 dari pagu senilai Rp97.299.623.000,00.

Nilai Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi selama Tahun 2022 sebesar 95,231% yang berarti implementasi kinerja telah selaras dengan proses penganggaran pada penyusunan perjanjian kinerja revisi di Tahun 2022.

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Badan Kebijakan Transportasi sebesar 84,96% dikategorikan Baik. Sedangkan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi sebesar 90,22% termasuk kategori Baik.

Adapun capaian kinerja dan anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini:

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		Target PK (%)	Realisasi Kinerja Desember 2022	Capaian terhadap PK 2022	Pagu Anggaran 2022	Realisasi Anggaran Desember 2022	Capaian Realisasi Anggaran thd Pagu Anggaran
SP.1. Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset di Bidang Perhubungan							
INITIAL OUTCOME							
IKP 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	80,0	-	-	-	-	-
INTERMEDIATE OUTCOME							
IKP 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	37,0	15,0	119,2	1.945.393.500,0	1.943.056.557,0	99,9
INITIAL OUTCOME							
IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	80,0	-	-	-	-	-
INTERMEDIATE OUTCOME							
IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	30,0	-	-	-	-	-
INITIAL OUTCOME							
IKP 3	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi lptek dan Sumber Daya Manusianya	80,0	-	-	-	-	-
INTERMEDIATE OUTCOME							
IKP 3	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi lptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	32,0	12,0	156,3	351.113.688,0	347.686.191,0	99,0
SP.2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi							
IKP 4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	85,0	166,0	116,2	29.581.618.812,0	29.388.010.515,0	99,3
SP.3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	79,5	79,2	99,6	65.421.497.000,0	65.418.121.179,0	100,0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				122,8	97.299.623.000,0	97.096.874.442,0	99,8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	1
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA.....	2
1.4 POTENSI, ISU STRATEGIS, DAN PERMASALAHAN.....	4
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN.....	4
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA.....	6
1.1 RENCANA STRATEGIS.....	6
1.2 PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III.....	15
AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	15
3.1.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	15
3.1.2 CAPAIAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI.....	16
3.2 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	29
3.2.1 ANALISIS CAPAIAN KELUARAN.....	29
3.2.2 ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN.....	30
3.2.3 ANALISIS EFISIENSI.....	31
3.2.4 ANALISIS KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI.....	32
3.2.5 PENILAIAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN TINGKAT UNIT ESELON I.....	34
3.3 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA.....	36
3.3.1 PENYELESAIAN 11 (SEBELAS) ISU STRATEGIS.....	36
3.3.2 HAK PATEN.....	38
3.3.3 PENGHARGAAN.....	38
3.3.4 KERJASAMA.....	39
3.3.5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2022.....	40
3.3.6 FGD DAN WEBINAR.....	42
3.4 ANALISIS CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2022.....	49

3.4.1 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022.....	49
3.4.2 ANALISIS DANA YANG TIDAK TERSERAP TAHUN 2022.....	50
BAB IV.....	52
PENUTUP	52
4.1. KESIMPULAN.....	52
4.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	54
LAMPIRAN.....	55
LAMPIRAN 1. PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PER IKP DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022	55
LAMPIRAN 2. DAFTAR KAJIAN YANG TERMANFAATKAN SESUAI IKP 1 INTERMEDIATE OUTCOME.....	61
LAMPIRAN 3. DAFTAR KAJIAN YANG TERMANFAATKAN SESUAI IKP 3 INTERMEDIATE OUTCOME.....	68
LAMPIRAN 4. SURAT PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.....	73
LAMPIRAN 5. RENCANA AKSI PADA 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi	3
Tabel 2 Korelasi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.....	8
Tabel 3 Rekomendasi Kebijakan Tahun 2022.....	17
Tabel 4 Pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022.....	17
Tabel 5 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 1 (Initial Outcome) Tahun 2022	19
Tabel 6 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 1 (Intermediate Outcome) Tahun 2022.....	20
Tabel 7 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 2 (Initial Outcome) Tahun 2022	21
Tabel 8 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 2 (Intermediate Outcome) Tahun 2022.....	22
Tabel 9 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 3 (Initial Outcome) Tahun 2022	23
Tabel 10 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 3 (Intermediate Outcome) Tahun 2022.....	24
Tabel 11 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 4 Tahun 2022.....	25
Tabel 12 Rincian Kegiatan IKP 4	26
Tabel 13 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	28
Tabel 14 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKP 5 Tahun 2022	28
Tabel 15 Tingkat Penyerapan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi	30
Tabel 16 Perhitungan Analisis Efisiensi	32
Tabel 17 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran Tahun 2022	33
Tabel 18 Judul Rekomendasi Kebijakan	36
Tabel 19 Kerjasama Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	39
Tabel 20 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kebijakan Transportasi.....	40
Tabel 21 Perkembangan Pagu Anggaran 2020-2022	49
Tabel 22 Capaian Daya Serap Per-Jenis Belanja Tahun 2022	50
Tabel 23 Capaian Daya Serap Per-Program Kegiatan Tahun 2022	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi	2
Gambar 2 Persentase SDM di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi 2022	2
Gambar 3 Proporsi SDM Berdasarkan Pendidikan.....	3
Gambar 4 Proporsi SDM Berdasarkan Gender.....	3
Gambar 5 Sasaran Strategis Badan Kebijakan Transportasi.....	6
Gambar 6 <i>Strategic Map</i> Badan Kebijakan Transportasi	7
Gambar 7 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Badan Litbang Perhubungan Tahun 2022	12
Gambar 8 Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi II yang disusun pada Juli 2022	13
Gambar 9 Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi III yang disusun pada Agustus 2022	13
Gambar 10 Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi IV yang disusun pada September 2022	14
Gambar 11 Perjanjian Kinerja Akhir Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022.....	14
Gambar 12 Rencana Penelitian Tahun Anggaran 2022	16
Gambar 13 Area Perubahan RB.....	27
Gambar 14 Nilai Kinerja Anggaran Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Perhubungan	30
Gambar 15 Pemberian apresiasi pemenang Lomba oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenkomarvest.....	39
Gambar 16 Piagam Penghargaan Juara ke-2 Lomba Konten UPT	39
Gambar 17 Webinar Upaya Percepatan Penerapan Kebijakan Kendaraan Listrik.....	42
Gambar 18 Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Lalu Lintas Angkutan Perkotaan	43
Gambar 19 FGD Keselamatan dan Keamanan Moda Darat dan Kereta Api.....	44
Gambar 20 Review Sistem Keselamatan dan Keamanan Moda Udara dan Laut Menuju Transportasi Maju	45
Gambar 21 Penyusunan Kebijakan <i>Light Rapid Transit</i> (LRT).....	46
Gambar 22 Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar – Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivitas	47
Gambar 23 FGD Dryport to Dryport (DP2DP) Project Gerderland	48
Gambar 24 FGD Seamless Connectivity dan Land Value Capture dalam Mendukung Pengoperasian Kereta Cepat Manfaat untuk Negeri	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai organisasi pelayanan publik, Badan Kebijakan Transportasi perlu menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja pencapaian sasaran strategis dan pengelolaan anggaran. Hal tersebut untuk mendukung *good governance and clean government* Kementerian Perhubungan. Adapun dasar hukum dari kegiatan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berkaitan dengan transformasi kelembagaan, Badan Kebijakan Transportasi yang semula merupakan Badan Litbang Perhubungan mempunyai perubahan orientasi pekerjaan. Guna mendukung visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, Badan Kebijakan Transportasi hadir sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang antisipatif dan responsive.

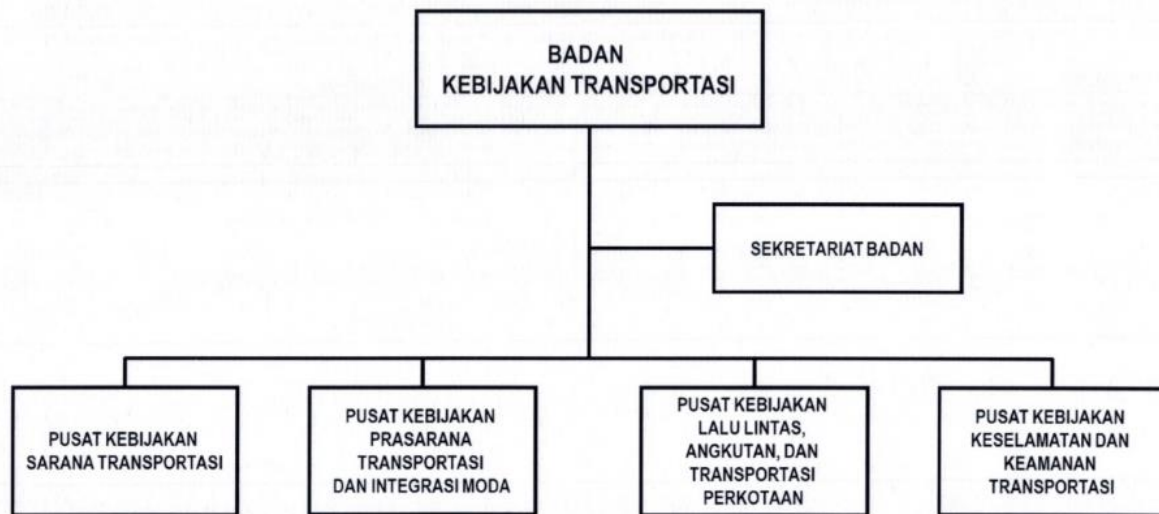
Selama masa transisi dan transformasi kelembagaan, Badan Kebijakan Transportasi menggunakan Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman perencanaan sampai dengan disahkannya Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi yang akan ditetapkan awal tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini disusun sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2022, tugas Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Sedangkan fungsi Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
- b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- c. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi;
- d. Pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Transportasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

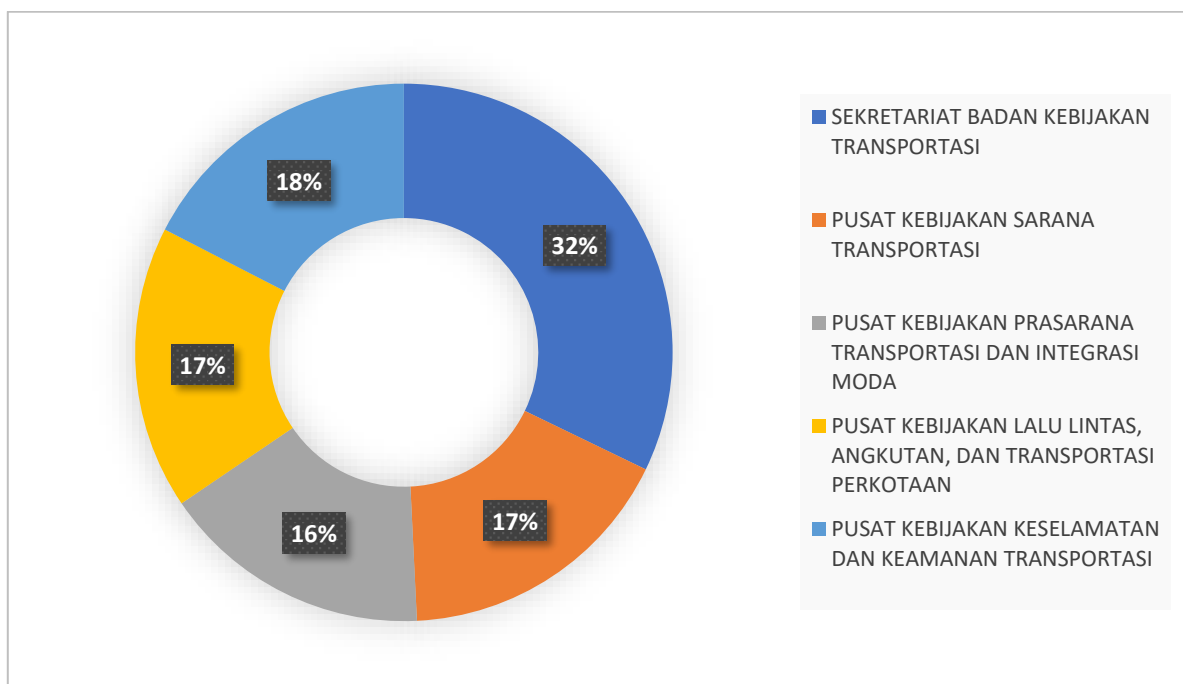
Badan Kebijakan Transportasi mempunyai 5 (lima) unit satuan kerja, yang digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi

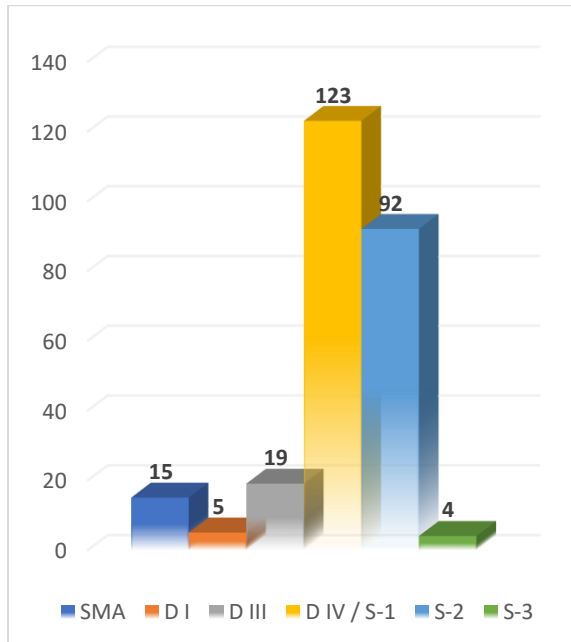
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Badan Kebijakan Transportasi. Jumlah SDM Badan Kebijakan Transportasi sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2022 tercatat sebanyak 258 pegawai dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2 Persentase SDM di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi 2022

Untuk mendukung sistem kerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, terdapat beberapa level pendidikan terakhir pegawai. Adapun sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Proporsi SDM Berdasarkan Pendidikan

Proporsi pegawai Badan Kebijakan Transportasi didominasi oleh Perempuan, akan tetapi secara umum, perbandingan jumlah pegawai berdasarkan gender cenderung seimbang. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4 Proporsi SDM Berdasarkan Gender

Untuk menunjang rangkaian kegiatan proses penyusunan rekomendasi kebijakan, Badan Kebijakan Transportasi mempunyai berbagai macam jabatan kepakaran sebagai berikut:

Tabel 1 Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Jabatan	Jumlah
Analisis Kebijakan	69
Perencana	14
Analisis Kepegawaian	7
Pranata Humas	9
Pranata Komputer	8
Arsiparis	2
Pengelola Barang/Jasa	2
Statistisi	9
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4
Pustakawan	4
Total	128

1.4 POTENSI, ISU STRATEGIS, DAN PERMASALAHAN

Sebagai unit kerja yang ditunjuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan analisis kebijakan transportasi, Badan Kebijakan Transportasi sesungguhnya memiliki potensi cukup besar untuk mengkoordinasikan/ mengkonsolidasikan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dukungan analisis kebijakan di lingkungan internal Kementerian Perhubungan. Peran sebagai lembaga analisis kebijakan bidang transportasi di tingkat pemerintahan pusat juga menjadikan Badan Kebijakan Transportasi memiliki potensi sekaligus tantangan untuk dapat mensinergikan kegiatan analisis kebijakan bidang transportasi khususnya dalam lingkup nasional dengan menggandeng perguruan tinggi dan instansi, serta stakeholder terkait di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan daerah, peran Badan Kebijakan Transportasi untuk dapat melayani masyarakat di tingkat lokal adalah melalui pelaksanaan analisis kebijakan pendampingan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Isu-isu strategis sektor transportasi yang semakin meningkat, dinamis, dan kompleks pada lingkup global, nasional, dan lokal membutuhkan kegiatan analisis kebijakan bidang perhubungan yang tepat, cepat dan akurat. Permasalahan di bidang transportasi sangat luas dan melibatkan banyak pihak. Dalam upaya mendukung pencapaian pembangunan transportasi yang tepat sasaran, kegiatan analisis kebijakan Badan Kebijakan Transportasi didasarkan pada isu-isu strategis sektor transportasi terkini. Secara lebih khusus pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan mengacu pada arahan direktif Presiden, penugasan Menteri Perhubungan, dan usulan daerah.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi dengan penekanan kepada potensi, sumber daya manusia, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

Bab II – Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis, Prioritas Nasional, Rencana Kerja, dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Kebijakan Transportasi pada tahun yang bersangkutan terdiri dari:

a. Analisis Capaian Kinerja

Menguraikan secara sistematis pencapaian kinerja pada tahun berjalan berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rentang waktu beberapa tahun, perbandingan antara

realisasi dan target dalam dokumen renstra, analisis keberhasilan/ kegagalan dan hambatan/ kendala capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.

- b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- c. Capaian Keberhasilan Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Lainnya;
- d. Realisasi Anggaran

Menguraikan pemanfaatan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi beserta analisis anggaran tidak terserap.

Bab IV – Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Kebijakan Transportasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Menyajikan lampiran yang mendukung Laporan Kinerja Badan Kebijakan Transportasi.

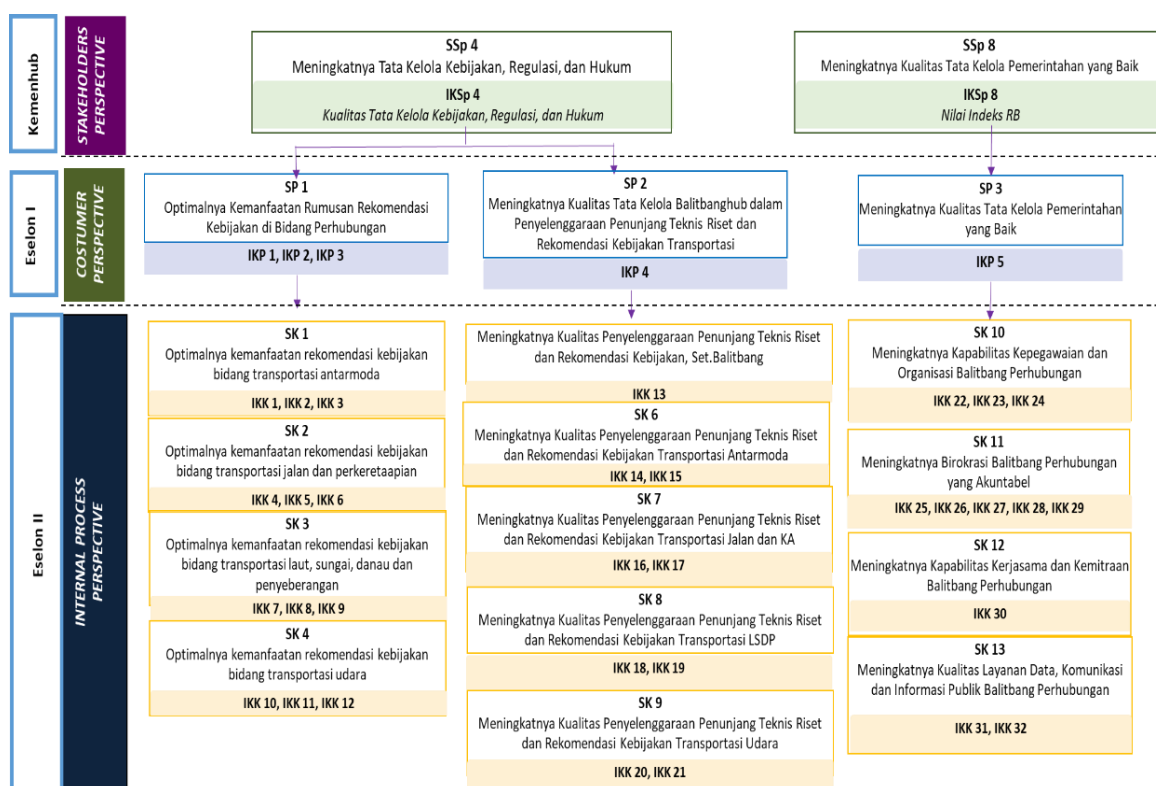
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS

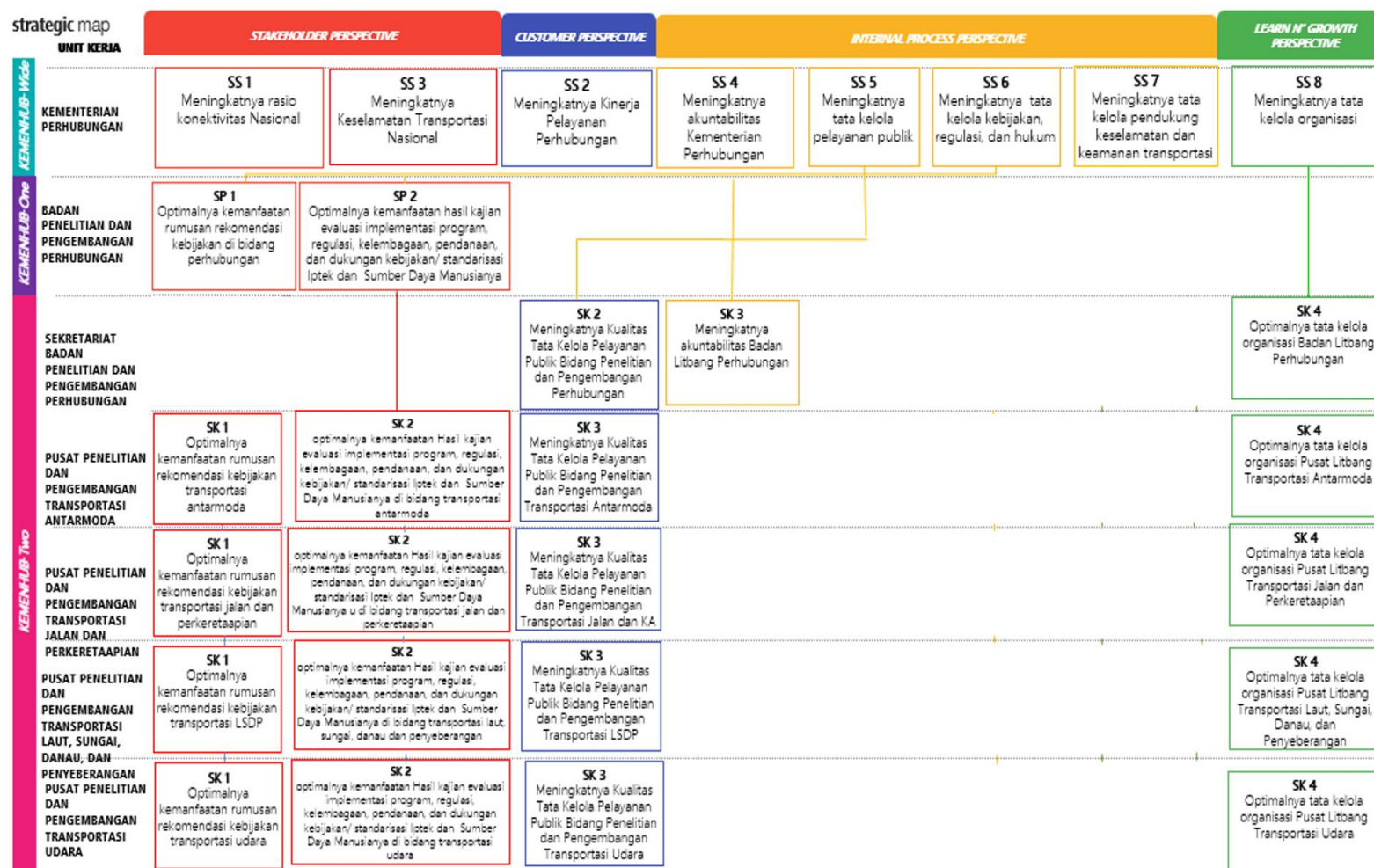
Badan Kebijakan Transportasi merupakan transformasi dari Badan Litbang Perhubungan. Selama proses transisi, Rencana Strategis Kebijakan Transportasi masih menggunakan Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor 145 Tahun 2020. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (RPJM Nasional 2020–2024) sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tahap Keempat Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis Badan Kebijakan Transportasi merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran strategis Badan Kebijakan Transportasi dan memperhatikan permasalahan dan capaian pada tahun 2020-2024 serta menjabarkan misi Badan Litbang Perhubungan. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal proses perspective*, dan *learning and growth perspective* sebagai berikut:



Gambar 5 Sasaran Strategis Badan Kebijakan Transportasi

IKP Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 yang menjadi dasar analisa capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Triwulan III Tahun 2022, sebagaimana disajikan dalam peta strategis berikut ini :



Gambar 6 Strategic Map Badan Kebijakan Transportasi

Korelasi antara tujuan, sasaran program, indikator kinerja program serta indikator dan metode perhitungan indikator kinerja sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Korelasi Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024		
CUSTOMER PERSPECTIVE										
SP 1	Optimalnya Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset di Bidang Perhubungan	IKP 1	Initial Outcome							
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan		%	75	75	80	85	90
			Intermediate Outcome							
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)		%	35	36	37	38	39
		IKP 2	Initial Outcome							
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan		%	75	75	80	85	90
			Intermediate Outcome							
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan pada (t-2)		%	30	30	30	32	32
		IKP 3	Initial Outcome							
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/		%	75	75	80	85	90

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET						
				2020	2021	2022	2023	2024		
CUSTOMER PERSPECTIVE										
			Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya							
			Intermediate Outcome							
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	30	31	32	33	34	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKP 4	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	80	80	85	85	90	
SP 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKP 5	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	78	79	79,5	80	80,5	

Adapun penjabaran dari perspektif Peta Strategis yang dituangkan dalam indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

- a. Sasaran Program Pertama (SP.1) yang akan dicapai adalah Optimalnya Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, dengan indikator kinerja Program yaitu sebagai berikut:

1) IKP 1 : Initial Outcome

Jumlah publikasi yang merupakan bagian dari hasil rekomendasi kebijakan dengan tema Kebijakan di Bidang Perhubungan

Intermediate Outcome

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)

2) IKP 2 : Initial Outcome

Jumlah publikasi Kebijakan Isu Strategis di bidang Perhubungan.

Intermediate Outcome

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di bidang Perhubungan

3) IKP 3 : Initial Outcome

Jumlah publikasi yang merupakan bagian dari rekomendasi kebijakan dengan tema kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusiannya.

Intermediate Outcome

Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusiannya

- b. Sasaran Program Kedua (SP.2) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola dalam penyelenggaraan penunjang teknis dan rekomendasi kebijakan transportasi, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

IKP 4 : Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis dan rekomendasi kebijakan transportasi

- c. Sasaran Program Ketiga (SP.3) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dengan Indikator Kinerja Program yaitu sebagai berikut:

IKP 5 : Indeks RB Kementerian Perhubungan

1.2 PERJANJIAN KINERJA

Badan Kebijakan Transportasi merupakan lembaga yang berfungsi dalam melaksanakan *policy research* di bidang transportasi yang berperan penting dalam menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan tugas analisis kebijakan diarahkan dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa transportasi, yaitu melalui (1) Rekomendasi rancangan kebijakan dan rekomendasi pemanfaatan hasil pemilihan teknologi di bidang transportasi, (2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pemanfaatan hasil pemilihan teknologi di bidang transportasi; (3) Pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang transportasi; dan (4) Penyediaan data hasil kajian kebijakan di bidang transportasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan Badan Litbang Perhubungan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Selain itu, terdapat pula peraturan turunan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai dasar transformasi kelembagaan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada 24 Agustus 2022. Saat ini Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 masih dalam tahap penyusunan sehingga yang menjadi dasar analisa capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Triwulan III Tahun 2022 adalah Indikator Kinerja (IK) yang tercantum dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan ini yang akan dijadikan dasar Penyusunan Renstra Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2020 – 2024. Kepala Badan Kebijakan Transportasi telah menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-BLT 65 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022. Indikator Kinerja Program (IKP) yang tertuang dalam surat keputusan tersebut ini baru akan dijadikan dasar pengukuran capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi apabila Renstra Badan Kebijakan Transportasi telah ditetapkan.

Badan Kebijakan Transportasi telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun secara berjenjang yang masih mengacu pada Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, terdapat revisi Perjanjian Kinerja, hal ini dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran dan adanya perubahan organisasi.

Pada tahun 2022, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 terkait kebutuhan revisi dokumen PK, Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun sebanyak lima dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu:

- (1) Dokumen PK awal yang disusun pada bulan Januari 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp174.302.325.000,00, dengan nomenklatur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- (2) Dokumen PK revisi II yang disusun pada bulan Juli 2022 dikarenakan adanya perubahan sasaran program dan indikator kinerja program yang mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KP-BLT 65 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024, adapun pagu yang digunakan tidak terdapat perubahan dari PK sebelumnya, yaitu sebesar Rp174.302.325.000,00;
- (3) Dokumen PK revisi III yang disusun pada bulan Agustus 2022 dikarenakan adanya perubahan pagu sehingga pagu menjadi Rp107.085.450.000,00 dan perubahan nomenklatur unit kerja eselon 1 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
- (4) Dokumen PK revisi IV yang disusun pada bulan September 2022 dikarenakan adanya perubahan Pejabat Tinggi Madya dan perubahan nomenklatur unit kerja eselon II sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun pagu yang digunakan tidak terdapat perubahan dari PK sebelumnya, yaitu sebesar Rp107.085.450.000,00;

- (5) Dokumen PK revisi V yang disusun pada bulan Desember 2022 dikarenakan adanya perubahan pagu pada DIPA, dengan pagu sebesar Rp97.299.623.000,00.

Berikut Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon 1 tahun anggaran 2022:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022				
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN				
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
SP 1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	IKP 1	a. Initial Outcome	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	% 80
			b. Intermediate Outcome	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	% 37
		IKP 2	a. Initial Outcome	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	% 80
			b. Intermediate Outcome	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	% 30
		IKP 3	a. Initial Outcome	
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi iptek dan Sumber Daya Manusianya	% 80
			b. Intermediate Outcome	
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	% 32
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKP 4	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	% 85
SP 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 5	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks 79,5

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	Rp 72.869.932.000,00
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Rp 21.351.443.000,00
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Rp 33.986.390.000,00
4. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp 22.395.463.000,00
5. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	Rp 23.699.097.000,00

Disetujui,

Menteri Perhubungan

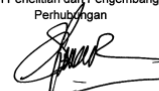


BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Januari 2022

Kepala

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan



UMAR ARIS

Keterangan : Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2022 terdapat pencantuman blokir DIPA pada Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi di lingkungan Badan Litbang Perhubungan yang disebabkan adanya pengalihan fungsi kelitbang ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) masih menunggu Peraturan Presiden.

Gambar 7 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Badan Litbang Perhubungan Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN				
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET
SP 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	Cukup
		IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	80
		IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	30
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	79,5

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	Rp 72.869.932.000,00
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Rp 21.351.443.000,00
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Rp 33.986.390.000,00
4. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp 22.395.463.000,00
5. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	Rp 23.699.097.000,00

Disetujui,
Menteri Perhubungan

Jakarta, Juli 2022
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI

UMAR ARIS

Gambar 8 Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi II yang disusun pada Juli 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI				
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET
SP 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi	IKP 1 Indeks Kualitas Kebijakan Transportasi	Indeks	Cukup
		IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	80
		IKP 3 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Transportasi (T-2)	%	30
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 4 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	79,5

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	Rp 69.865.636.000,00
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Rp 7.806.966.000,00
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Rp 13.175.180.000,00
4. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp 8.561.042.000,00
5. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	Rp 7.676.626.000,00

Disetujui,
Menteri Perhubungan

Jakarta, Agustus 2022
Kepala
Badan Kebijakan Transportasi

BUDI KARYA SUMADI

UMAR ARIS

Gambar 9 Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi III yang disusun pada Agustus 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI				
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
SP 1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	IKP 1	a. <i>Initial Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	% 80
			b. <i>Intermediate Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	% 37
		IKP 2	a. <i>Initial Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	% 80
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKP 4	b. <i>Intermediate Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	% 30
			a. <i>Initial Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi iptek dan Sumber Daya Manusianya	% 80
			b. <i>Intermediate Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	% 32
SP 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 5	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	% 85
			Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks 79,5

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	Rp 69.865.636.000,00
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Rp 7.806.966.000,00
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Rp 13.175.180.000,00
4. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp 8.561.042.000,00
5. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	Rp 7.676.626.000,00

Disetujui, Menteri Perhubungan	Jakarta, September 2022 Kepala Badan Kebijakan Transportasi
 BUDI KARYA SUMADI	 GEDE PASEK SUARDIKA

Gambar 10 Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi IV yang disusun pada September 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI				
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
SP 1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	IKP 1	a. <i>Initial Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	% 80
			b. <i>Intermediate Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	% 37
		IKP 2	a. <i>Initial Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	% 80
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKP 4	b. <i>Intermediate Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	% 30
			a. <i>Initial Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi iptek dan Sumber Daya Manusianya	% 80
			b. <i>Intermediate Outcome</i>	
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	% 32
SP 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 5	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	% 85
			Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks 79,5

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	Rp 65.421.497.000,00
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Rp 7.325.252.000,00
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Rp 9.352.995.000,00
4. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp 8.056.823.000,00
5. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	Rp 7.143.056.000,00

Disetujui, Menteri Perhubungan	Jakarta, Desember 2022 Kepala Badan Kebijakan Transportasi
 BUDI KARYA SUMADI	 GEDE PASEK SUARDIKA

Gambar 11 Perjanjian Kinerja Revisi V yang disusun pada bulan Desember Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.1.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Tahapan pengukuran kinerja Badan Kebijakan Transportasi dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis *web*, yaitu *e-performance* dengan alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk *monitoring* capaian kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, II, dan III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya.

Metode pengukuran kinerja lingkup Badan Kebijakan Transportasi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang disusun dalam laporan monitoring capaian kinerja setiap triwulan. Selain itu, sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan *monitoring* capaian realisasi target *output* kegiatan, Badan Kebijakan Transportasi menyusun laporan Rencana Aksi Kinerja Bulanan. Laporan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam bentuk kertas kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang disusun setiap Bulan. Selain Laporan Rencana Aksi Kinerja, Badan Kebijakan Transportasi menyusun Laporan Evaluasi Program secara periodik setiap triwulan sebagai bentuk *monitoring* kinerja target dan realisasi anggaran.

Monitoring capaian kinerja *output* kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara, Kemenkeu melakukan *monitoring* capaian target dan proses *output*/kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>. Sedangkan, Bappenas sendiri melalui pemanfaatan aplikasi e-monev penerapan PP 39 Tahun 2006 dengan alamat <http://e-monev.bappenas.go.id/emon3> dalam bentuk *monitoring* realisasi target anggaran dan *output* kegiatan.

Capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target rencana dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif.

Penghitungan persentase capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penetapan cara perhitungan persentase kinerja untuk Badan Kebijakan Transportasi adalah apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus:

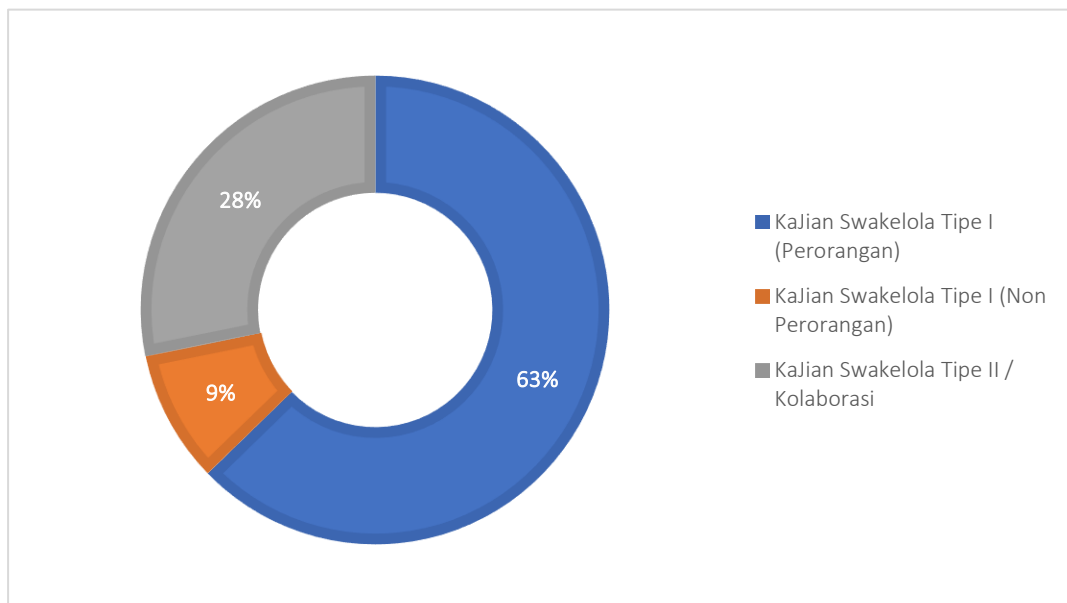
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun tahapan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Kinerja pada Tahun 2022 dalam Renstra Badan Kebijakan Transportasi 2020-2024.

3.1.2 CAPAIAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Program dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2022. telah direncanakan terdapat 110 penelitian yang akan dilaksanakan, terdiri atas 10 penelitian yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola Tipe I studi non-perorangan, 69 penelitian yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola Tipe I studi perorangan, dan 31 penelitian dengan mekanisme swakelola Tipe III (kerja sama/ kolaborasi) ditunjukkan secara persentase sebagaimana diagram berikut:



Gambar 12 Rencana Penelitian Tahun Anggaran 2022

Adapun dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang berkaitan dengan riset tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan adanya pengalihan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan penelitian dan pengembangan kepada BRIN. Meskipun demikian, selama tahun 2022, selama masa transisi menuju Badan Kebijakan Transportasi, telah disusun dan disampaikan kepada Menteri Perhubungan sebanyak 44 rekomendasi kebijakan. Capaian output rekomendasi kebijakan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3 Rekomendasi Kebijakan Tahun 2022

No	Tema	Jumlah Rekomendasi Kebijakan
1	Bidang Sarana Transportasi	6
2	Bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	13
3	Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	17
4	Bidang Keselamatan dan Keamanan	8
Total		44

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Tahun 2022 yang dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, berikut adalah pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi pada Triwulan IV TA 2022:

Tabel 4 Pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022

KODE IKP	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	REALISASI	CAPAAN KINERJA (%)
IKP 1	<i>Initial Outcome</i>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	80	N/A	N/A
	<i>Intermediate Outcome</i>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	37	44,118	119,237
IKP 2	<i>Initial Outcome</i>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	%	80	N/A	N/A
	<i>Intermediate Outcome</i>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	%	30	N/A	N/A

KODE IKP	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
IKP 3	Initial Outcome	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	80	N/A	N/A
	Intermediate Outcome	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan pendanaan dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	32	50	156,25
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 1: Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan						137,743
IKP 4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis dan rekomendasi kebijakan transportasi		%	85	98,810	116,246
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Balitbanghub Dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi						116,246
IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan		Indeks	79,5	79,2*	99,623
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						99,623
Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi						122,839

*Nilai Indeks RB Kemenhub TA 2021, sedangkan nilai RB Kemenhub TA 2022 sedang proses penilaian KemenpanRB

Adapun capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi jika dijabarkan setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM 1 (SP.1)

Sasaran program 1 Badan Kebijakan Transportasi adalah optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan. Pencapaian sasaran strategis Badan Kebijakan Transportasi diukur dengan tiga IKP *initial* dan *intermediate outcome*, yaitu:

a. IKP 1 Initial Outcome

Pada Tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan dapat menyelesaikan penelitian sebanyak 26 judul kajian untuk dapat diserahterimakan kepada *stakeholder* terkait. Adapun kegiatan penelitian tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal ini berkaitan dengan pengalihan fungsi penelitian dan pengembangan kepada BRIN. Adapun metode Perhitungan IKP 1 *Initial Outcome* sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang diterima oleh Menteri.} \\ \text{Sub Sektor Perhubungan. dan Stakeholder}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan sesuai Fokus} \\ \text{dan Agenda Prioritas Kementerian yang Diajukan}} \times 100\%$$

Secara rinci capaian target untuk IKP 1 (*Initial Outcome*) dibandingkan dengan target PK disajikan beserta anggaran yang digunakan pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 1 (Initial Outcome) Tahun 2022

IKP 1 (<i>Initial Outcome</i>): Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan							
KINERJA TA. 2022			ANGGARAN TA. 2022			REALISASI TA. 2021	TARGET 2024
TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
80	N/A	N/A	-	-	-	96,67	90

Secara umum, IKP 1 (initial program) tidak dapat dilakukan pengukuran, sehingga realisasi kinerja tidak dapat di hasilkan. Dalam proses mencapai target kinerja, terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pengalihan kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional);
- 2) Adanya blokir anggaran yang berkaitan dengan kegiatan berbasis Riset dan Inovasi diseluruh K/L;
- 3) Adanya transformasi kelembagaan dari Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi;
- 4) Perpindahan SDM Peneliti di lingkungan Badan Litbang Perhubungan kepada BRIN.

Pada RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi yang sedang disusun, indikator kinerja program ini tidak lagi digunakan, hal ini karena proses bisnis Badan Kebijakan Transportasi berorientasi pada kualitas rekomendasi kebijakan sedangkan pada Badan Litbang Perhubungan berorientasi pada hasil penelitian.

b. IKP 1 *Intermediate Outcome*

Rekomendasi kebijakan hasil rekomendasi kebijakan yang telah diserahkan kepada *stakeholder* Badan Kebijakan Transportasi beberapa di antaranya ada yang bersifat pemanfaatan langsung pada tahun berjalan (aplikatif), namun beberapa bersifat tidak langsung termamfaatkan. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja pemanfaatan penelitian yang bersifat tidak langsung dimanfaatkan diwujudkan melalui indikator Persentase Pemanfaatan Hasil rekomendasi kebijakan pada (t-2), dimana t adalah tahun IKP.

Untuk mengetahui tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan yang telah diserahkan pada tahun 2020 kepada pengguna, Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2022 melakukan identifikasi melalui *monitoring* pemanfaatan atau tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan. Tujuan adanya indikator ini adalah sebagai *quality control* sekaligus sebagai bahan evaluasi Badan Kebijakan Transportasi terhadap tindak lanjut pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan pada tahun 2020.

Pelaksanaan monitoring pemanfaatan atau tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan dalam hal ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja Eselon II berdasarkan bidang transportasi. Monitoring ini dilaksanakan dalam interval dua tahunan terhadap rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Pemanfaatan tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan tersebut dapat berupa acuan dalam pengembangan sektor transportasi.

Metode Perhitungan IKP 1 *Intermediate Outcome*:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dimanfaatkan oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan Stakeholder pada (t-2)}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan sesuai Fokus dan Agenda Prioritas Kementerian yang Diajukan pada (t-2)}} \times 100\%$$

Target persentase pemanfaatan hasil monitoring (t-2), t adalah tahun IKP yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I Tahun 2022 sebesar 37% dapat terealisasi sebesar 44,118% sehingga pada triwulan IV diperoleh capaian kinerja sebesar 119,237%. Pada Tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi direncanakan akan melakukan monitoring terhadap 34 judul rekomendasi kebijakan tahun 2020, sampai dengan triwulan IV tahun 2022 telah didapatkan 15 rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Adapun kinerja anggaran IKP 1 mencapai 99,88% dibandingkan pagu yang tersedia. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi IKP 1 *Intermediate Outcome* melebihi target. Kinerja beserta anggaran yang digunakan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 6 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 1 (*Intermediate Outcome*) Tahun 2022

IKP 1 (<i>Intermediate Outcome</i>): Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)							
KINERJA TA. 2022			ANGGARAN TA. 2022			REALISASI TA. 2021	TARGET 2024
TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
37	44,118	119,237	1.9453.93.500	1.943.056.557	99,88	50	39

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Triwulan IV, telah diperoleh capaian kinerja yang melebihi target Triwulan IV, dan sudah mencapai target PK. Faktor keberhasilan tercapainya IKP 1 (*Intermediate Outcome*) yaitu dilaksanakannya monitoring tindak lanjut hasil penelitian oleh Badan Kebijakan Transportasi secara rutin, untuk mengetahui pemanfaatan dari rekomendasi kebijakan yang telah diserahterimakan kepada para pengguna jasa penelitian dan pengembangan. Secara rinci, hasil monitoring tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian (t-2) disajikan pada data dukung IKP 1 (*Intermediate Outcome*). (**Lampiran 2**)

Pada RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi yang sedang disusun, indikator kinerja program ini tidak lagi digunakan, hal ini karena proses bisnis Badan Kebijakan Transportasi berorientasi pada kualitas rekomendasi kebijakan sedangkan pada Badan Litbang Perhubungan berorientasi pada hasil penelitian.

c. IKP 2 *Initial Outcome*

Pada Tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi ditargetkan dapat menyelesaikan sebanyak 69 judul penelitian isu strategis untuk dapat diserahterimakan kepada *stakeholder* terkait. Pada Tahun 2022, beberapa kajian yang diajukan sebagai rekomendasi kebijakan isu strategis tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan pengalihan fungsi penelitian dan pengembangan kepada BRIN. Namun demikian, Badan Kebijakan Transportasi telah menyusun 44 rekomendasi kebijakan dan telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

IKP 2 (*Initial Outcome*) diperoleh melalui rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis yang diterima oleh Menteri. Sub Sektor Perhubungan. dan Stakeholder}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis sesuai Fokus dan Agenda Prioritas Kementerian yang Diajukan}} \times 100\%$$

Secara rinci capaian target untuk IKP 2 (*Initial Outcome*) dibandingkan dengan target Revisi PK disajikan beserta anggaran yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 2 (*Initial Outcome*) Tahun 2022

IKP 2 (<i>Initial Outcome</i>) Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan							
KINERJA TA. 2022			ANGGARAN TA. 2022			REALISASI TA. 2021	TARGET 2024
TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
80	N/A	N/A	-	-	-	100	90

Secara umum, IKP 2 (initial program) tidak dapat dilakukan pengukuran, sehingga realisasi kinerja tidak dapat di hasilkan. Dalam proses mencapai target kinerja, terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pengalihan kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional);

- 2) Adanya blokir anggaran yang berkaitan dengan kegiatan berbasis Riset dan Inovasi diseluruh K/L;
- 3) Adanya transformasi kelembagaan dari Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi;
- 4) Perpindahan SDM Peneliti di lingkungan Badan Litbang Perhubungan kepada BRIN.

Pada RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi yang sedang disusun, indikator kinerja program ini tidak lagi digunakan, hal ini karena proses bisnis Badan Kebijakan Transportasi berorientasi pada kualitas rekomendasi kebijakan sedangkan pada Badan Litbang Perhubungan berorientasi pada hasil penelitian.

d. IKP 2 *Intermediate Outcome*

Rekomendasi kebijakan isu strategis hasil kajian Badan Kebijakan Transportasi yang telah diserahterimakan kepada *stakeholder* terkait yang bersifat pemanfaatan langsung pada tahun berjalan (aplikatif) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis yang dimanfaatkan oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan Stakeholder}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis sesuai Fokus dan Agenda Prioritas Kementerian yang Diajukan}} \times 100\%$$

Pada Triwulan IV Tahun 2022, target tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis di bidang perhubungan sebesar 30%. Pada IKP 2 *Intermediate Outcome* sangat dipengaruhi oleh IKP 2 *Initial Outcome*. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa fungsi kelitbangan dilaksanakan oleh BRIN, hal ini berdampak kepada IKP 2 *Initial Outcome* tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Litbang Perhubungan. Oleh karena itu, IKP 2 *Intermediate Outcome* tidak dapat dilakukan pemantauan kemanfaatannya.

Secara rinci capaian target untuk IKP 2 (*Intermediate Outcome*) dibandingkan dengan target PK disajikan beserta anggaran yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 2 (*Intermediate Outcome*) Tahun 2022

IKP 2 (<i>Intermediate Outcome</i>) Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan pada (t-2)							
KINERJA TA. 2022			ANGGARAN TA. 2022			REALISASI TA. 2021	TARGET 2024
TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
30	N/A	N/A	-	-	-	31,88	32

Secara umum, IKP 2 (*initial program*) tidak dapat dilakukan pengukuran, sehingga realisasi kinerja tidak dapat di hasilkan. Dalam proses mencapai target kinerja, terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pengalihan kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional);
- 2) Adanya blokir anggaran yang berkaitan dengan kegiatan berbasis Riset dan Inovasi diseluruh K/L;

- 3) Adanya transformasi kelembagaan dari Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi;
- 4) Perpindahan SDM Peneliti di lingkungan Badan Litbang Perhubungan kepada BRIN.

Sebagai tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi IKP 2 Intermediate Outcome, diperlukan penyesuaian Indikator Kinerja dengan proses bisnis Badan Kebijakan Transportasi. Saat ini, telah dilakukan penyusunan dan pematangan RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi, dengan melakukan audiensi kepada K/L lain. Sehingga diharapkan, Indikator Kinerja dapat disusun dengan tepat.

e. IKP 3 Initial Outcome

Pada Tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi berencana akan menyelesaikan sebanyak 110 judul penelitian untuk kemudian hasil kajian tersebut diserahterimakan kepada *stakeholder* terkait. Dari total kajian tersebut, direncanakan sebanyak 14 hasil kajian diajukan sebagai rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya. Pada tahun 2022, semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi. Hal ini dikarenakan, semua kegiatan yang berkaitan dengan kelitbang di alihkan kepada BRIN. Adapun IKP 3 (*Initial Outcome*) diperoleh melalui rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan SDM yang diterima oleh Menteri / Sub Sektor dan Stakeholder}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi yang Diajukan}} \times 100\%$$

Berikut data target, realisasi, capaian kinerja dan anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja IKP 3 (*initial outcome*):

Tabel 9 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 3 (Initial Outcome) Tahun 2022

IKP 3 (<i>Initial Outcome</i>): Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya							
KINERJA TA. 2022			ANGGARAN TA. 2022			REALISASI TA. 2021	TARGET 2024
TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
80	N/A	N/A	-	-	-	100	90

Secara umum, IKP 3 (initial program) tidak dapat dilakukan pengukuran, sehingga realisasi kinerja tidak dapat dihasilkan. Dalam proses mencapai target kinerja, terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pengalihan kegiatan dan anggaran penelitian dan pengembangan kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional);
- 2) Adanya blokir anggaran yang berkaitan dengan kegiatan berbasis Riset dan Inovasi diseluruh K/L;
- 3) Adanya transformasi kelembagaan dari Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi;

- 4) Perpindahan SDM Peneliti di lingkungan Badan Litbang Perhubungan kepada BRIN.

Pada RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi yang sedang disusun, indikator kinerja program ini tidak lagi digunakan, hal ini karena proses bisnis Badan Kebijakan Transportasi berorientasi pada kualitas rekomendasi kebijakan sedangkan pada Badan Litbang Perhubungan berorientasi pada hasil penelitian.

f. IKP 3 *Intermediate Outcome*

Badan Kebijakan Transportasi pada tahun 2022 telah melakukan identifikasi melalui *monitoring* pemanfaatan atau tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan. Tujuan indikator ini adalah sebagai *quality control* sekaligus sebagai bahan evaluasi Badan Kebijakan Transportasi terhadap tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian pada tahun 2020. Pelaksanaan monitoring pemanfaatan atau tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan dalam hal ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja Eselon II berdasarkan bidang transportasi. Monitoring ini dilaksanakan dalam interval dua tahunan terhadap rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Pemanfaatan tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan tersebut dapat berupa acuan dalam pengembangan sektor transportasi.

Target persentase pemanfaatan hasil monitoring (t-2) sebesar 32% dapat terealisasi sebesar 50% sehingga capaian kinerja sebesar 156,250%. Pada Tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi direncanakan akan melakukan monitoring terhadap 24 judul rekomendasi kebijakan tahun 2020, sampai dengan triwulan IV tahun 2022 telah didapatkan 12 hasil rekomendasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusiannya pada (t-2) diperoleh dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implelementasi Program. Regulasi. Kelembagaan. Pendanaan. dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan SDM yang dimanfaatkan oleh Menteri. Sub Sektor Perhubungan. dan Stakeholdes pada (t-2)}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implelementasi yang Diajukan}} \times 100\%$$

Secara rinci capaian target per-triwulan untuk IKP 3 (*Intermediate Outcome*) dibandingkan dengan target Revisi PK disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 3 (Intermediate Outcome) Tahun 2022

IKP 3 (<i>Intermediate Outcome</i>): Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusiannya pada (t-2)							
KINERJA TA. 2022			ANGGARAN TA. 2022			REALISASI TA. 2021	TARGET 2024
TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
32	50	156,250	351.113.688	347.686.191	99,024	44,44	34

Pada tahun 2022, realisasi kinerja telah mencapai target PK. Faktor keberhasilan tercapainya IKP 3 (*Intermediate Outcome*) yaitu dilaksanakannya monitoring tindak lanjut hasil penelitian oleh Badan Kebijakan Transportasi, untuk mengetahui pemanfaatan dari rekomendasi kebijakan yang telah diserahterimakan kepada para pengguna jasa penelitian dan pengembangan. Secara rinci, rekomendasi kebijakan isu strategis hasil penelitian yang telah diserahterimakan kepada

stakeholder Badan Kebijakan Transportasi yang bersifat pemanfaatan langsung disajikan pada data dukung IKP 3 (**Lampiran 3**).

Secara umum, Sasaran Program 1 Badan Kebijakan Transportasi telah tercapai, khususnya di IKP 1 *intermediate outcome* dan IKP 3 *intermediate outcome*. Adapun untuk IKP yang lain pada SP.1 tidak dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan kegiatan penelitian telah beralih ke BRIN.

SASARAN PROGRAM 2 (SP.2)

Sasaran program 2 Badan Kebijakan Transportasi adalah meningkatnya kualitas tata kelola Balitbanghub dalam penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi. Pencapaian sasaran strategis Badan Kebijakan Transportasi diukur dengan satu IKP (IKP 4) yaitu tingkat Ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi.

Indikator kinerja ini menunjukkan persentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi untuk peningkatan kualitas penelitian diperoleh dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi yang Terselenggara}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Penunjang Teknis Riset dan rekomendasi Kebijakan Transportasi yang Terselenggara}} \times 100\%$$

Penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi terdiri dari *Workshop/FGD/Roundtable/Seminar* dalam negeri, Sidang, Konferensi, dan Studi banding internasional, Jurnal Transportasi, KSP, Bimbingan Teknis, Penyusunan *Database* Penelitian, Publikasi hasil penelitian, Pembinaan jabatan fungsional, Penyusunan SOP, Penyusunan formasi pegawai, Analisis evaluasi dan jabatan, dan Penyusunan HAKI.

Secara rinci capaian target triwulan IV untuk IKP 4 dibandingkan dengan target Revisi PK disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11 Target dan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran IKP 4 Tahun 2022

IKP 4: Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi							
KINERJA TA. 2022			ANGGARAN TA. 2022			REALISASI TA. 2021	TARGET 2024
TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
85	98,810	116,246	29.581.618.812	29.388.010.515	99,346	100,54	90

Berdasarkan hasil analisis monitoring dan evaluasi triwulan IV, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja telah mencapai PK. Dalam proses mencapai target kinerja, terdapat beberapa kendala yang dialami yaitu:

- 1) Pada awal tahun anggaran 2022, pagu program yang berkaitan dengan riset tidak dapat digunakan (diblokir), sehingga proses penyusunan rekomendasi kebijakan terhambat;
- 2) Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tidak dapat dilakukan, seperti HAKI dan publikasi hasil penelitian.

Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya dilakukan sebagai faktor keberhasilan pencapaian kinerja IKP 4 yaitu:

- 1) Optimalisasi media *zoom meeting* dalam penyusunan rekomendasi kebijakan;
- 2) Komitmen bersama Pimpinan dan Seluruh Pegawai Badan Kebijakan Transportasi untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja.

Rincian kegiatan yang terdapat dalam IKP 4 sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Kegiatan IKP 4

KODE OUTPUT	URAIAN	TARGET				REALISASI			
		Pusjak KKT	Pusjak LLATP	Pusjak Sarana	Pusjak PTIM	Pusjak KKT	Pusjak LLATP	Pusjak Sarana	Pusjak PTIM
103	Layanan Dukungan Manajemen Es.1								
	Penyusunan Program dan Evaluasi	12	12	13	9	12	12	12	9
	Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan TU	4	14	3	3	4	14	3	3
101	Layanan Penunjang Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi								
	Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan								
	- FGD	5	1	0	0	5	1	0	0
	- Webinar	0	3	1	0	0	3	1	0
	- Isu Strategis	6	0	2	11	6	0	2	11
	- Workshop	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Layanan Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Pelaksanaan Penunjang Penelitian								
	-Jurnal	2	2	2	1	2	2	2	1
	-KSP	0	3	0	0	0	0	0	0
	-Bimtek	2	5	0	0	2	5	0	0
	-PUI	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Angleb	1	0	1	0	2	1	1	0
	-Database	1	0	2	1	1	0	2	1
	-Publikasi hasil Penelitian	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Urusan kepegawaian	2	0	0	0	2	0	0	0
	-Evaluasi Kemanfaatan	0	1	0	0	0	1	0	0
	-Kelompok Kerja IKN	0	0	0	0	0	0	0	0
	-HAKI	0	0	0	0	0	0	0	0
4653	Layanan Perkantoran	12	12	12	7	12	12	12	7
TOTAL		47	53	36	32	48	51	35	32

Secara umum, Sasaran Program 2 Badan Kebijakan Transportasi telah tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2022 diperoleh nilai yang lebih rendah, hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan rutin yang berkaitan dengan penelitian sudah tidak dapat dilaksanakan. Kedepan, IKP ini tidak dapat dicantumkan dalam RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi, dikarenakan adanya perubahan proses bisnis yang semula berorientasi hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan.

SASARAN PROGRAM 3 (SP.3)

Sasaran program 3 Badan Kebijakan Transportasi adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian sasaran strategis Badan Kebijakan Transportasi diukur dengan satu IKP (IKP 5), yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan.

Reformasi Birokrasi adalah upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem peyelenggaraan pemerintah. Tujuan dari Reformasi Birokrasi diantaranya mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:



Gambar 13 Area Perubahan RB

Dengan Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, nilai indeks RB Badan Kebijakan Transportasi didasarkan nilai RB Kementerian Perhubungan yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan-RB. Proses penilaian dilakukan pada Tahun 2022 dan nilai akan disampaikan oleh Kemenpan-RB di Tahun 2023.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/78/M.RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tanggal 7 Maret 2022. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2021 adalah **79.20** dengan kategori “**BB**” dengan rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021
A			
	1. Pemenuhan	20,00	17,86
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,73
	3. Reform	30,00	20,58
Total Komponen Pengungkit		60,00	45,17
B			
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,29
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,10
	3. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,20
	4. Kinerja Organisasi	10,00	8,44
Total Komponen Hasil		40,00	34,03
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	79,20

Target Indeks RB tahun 2022 sebesar 79,5 dengan realisasi Indeks RB tahun 2021 yaitu **79,20**, jika dibandingkan dengan target indeks RB Tahun 2021 maka realisasi indeks RB Tahun 2021 sama dengan target, sedangkan jika dibandingkan dengan target indeks RB Tahun 2022 maka diperoleh capaian kinerja sebesar **99,623 %**. Saat ini, indeks RB Tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PANRB dan hasil indeks RB tersebut baru akan disampaikan pada tahun 2023 sehingga sampai untuk sementara nilai capaian kinerja indeks RB menggunakan capaian indeks RB tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 Nomor BA-Itjen 7 Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, telah melakukan penilaian mandiri indeks RB dan diperoleh nilai evaluasi RB sebesar 86,48.

Tabel 14 Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKP 5 Tahun 2022

IKP 5: Indeks RB Kementerian Perhubungan							
KINERJA TA. 2022			ANGGARAN TA. 2022			REALISASI TA. 2021	TARGET 2024
TARGET (indeks)	REALISASI (Indeks)	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
79,5	79,2	99,623	65.421.497.000	65.418.121.179	99,995	79,2	80,5

3.2 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pada masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa efisiensi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi yaitu penggunaan sarana digitalisasi dan pemberlakuan kombinasi pola kerja secara *Working from Home* (WFH). Kegiatan Apel Pagi, Rapat, dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang pada masa sebelum pandemi dilakukan secara bertatap muka langsung, diganti dengan pertemuan secara daring, webinar memanfaatkan aplikasi *zoom meeting*. Selain itu, *survey* penelitian yang sebelumnya dilaksanakan langsung pada lokasi, diganti dengan memanfaatkan aplikasi *e-survey*.

Dalam tahapan ini dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat efisiensi/penghematan penggunaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan yang dialokasikan dalam DIPA Kementerian Perhubungan TA.2021 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dinyatakan dalam ketercapaian/ ketidaktercapaian pelaksanaan Indikator Kinerja Program (IKP).

Pada Tahun 2021 telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/ PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK 02/ 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada peraturan terbaru mengatur tata cara pengukuran pada proses evaluasi kinerja, yang terdiri 5 (lima) indikator, dengan pengelompokan kategori Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang; dan
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Kurang.

3.2.1 ANALISIS CAPAIAN KELUARAN

Capaian Keluaran (*Output*) Program Badan Kebijakan Transportasi diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Program dengan target indikator Keluaran (*Output*) Program (tabel 4).

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{n=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

dimana:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program

smart.kemenkeu.go.id/app2022/ki/NKAUnit_id

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Role: Piliin TA (2022) Logout

NKA Eselon I

Monitoring / NKA Eselon I

Download Excel

Tampilkan 20 entri

Cari:

No.	Kode Eselon I	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
2	03	Inspektur Jenderal	95.03	97.03	98.60	99.41	100.00	1.48	53.7	96.54
4	04	Direksi Perhubungan Laut	91.46	100.00	97.36	98.71	100.00	9.12	72.8	85.67
6	06	Direksi Perkeretaapian	90.89	100.00	98.50	94.88	100.00	6.61	66.525	85.33
7	11	Badan Kebijakan Transportasi	90.23	99.90	99.79	95.23	100.00	0.21	50.525	85.53
3	03	Direksi Perhubungan Darat	90.11	100.00	98.52	90.75	100.00	5.31	63.275	84.33
9	13	Badan Pengelola Transportasi Jalodaratbek	89.79	100.00	99.98	90.50	100.00	3.86	59.65	83.99
5	05	Direksi Perhubungan Udara	89.00	100.00	97.27	96.92	100.00	2.73	56.825	82.38
1	01	Sekretariat Jenderal	87.56	93.14	99.54	99.02	93.40	-6.13	34.675	86.95
8	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	61.96	21.26	99.28	96.97	93.16	-1.96	45.1	82.87

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2021 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi SMART 2.0.0 2023-01-14 09:08:12

*Sumber: Aplikasi SMART tanggal 14 Januari 2022

Gambar 14 Nilai Kinerja Anggaran Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pencapaian Keluaran (Output) Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 sebesar 100% yang diperoleh sebagaimana tabel di atas.

3.2.2 ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN

Persentase penyerapan anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2022 didapatkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

dimana:

P : Penyerapan Anggaran

RA : Akumulasi Realisasi Anggaran

PA : Akumulasi Pagu Anggaran

Tabel 15 Tingkat Penyerapan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi

No.	Bulan	RPD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	RPD Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)
1	Januari	3.928.962.913	3.318.525.252	3.928.962.913	3.318.525.252
2	Februari	4.348.145.391	3.811.092.537	8.277.108.304	7.129.617.789
3	Maret	7.326.958.415	6.869.993.208	15.604.066.719	13.999.610.997
4	April	9.257.375.924	9.662.023.295	24.861.442.643	23.661.634.292

No.	Bulan	RPD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	RPD Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)
5	Mei	7.810.828.517	7.486.420.777	32.672.271.160	31.148.055.069
6	Juni	8.800.051.405	9.150.054.633	41.472.322.565	40.298.109.702
7	Juli	9.113.103.214	9.335.391.085	50.585.425.779	49.633.500.787
8	Agustus	9.556.600.943	9.711.576.908	60.142.026.722	59.345.077.695
9	September	9.375.695.260	9.966.156.296	69.517.721.982	69.311.233.991
10	Oktober	9.220.861.226	9.207.110.251	78.738.583.208	78.518.344.242
11	November	9.209.891.384	8.343.514.141	87.948.474.592	86.861.858.383
12	Desember	9.351.148.408	10.235.016.059	97.299.623.000	97.096.874.442

*sumber : SMART.Kemenkeu.co.id

$$P = \frac{97.096.874.442}{97.299.623.000} \times 100\%$$

$$P = 99,79\%$$

Penyerapan Anggaran Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan Tahun 2022 mencapai 99,79% yang diperoleh dari pembagian Akumulasi Realisasi Anggaran dengan Akumulasi Pagu Anggaran dan dikalikan 100%.

3.2.3 ANALISIS EFISIENSI

Formula penghitungan efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

dimana:

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i berdasarkan aplikasi smart sebesar 100%

$$E = \frac{((97.299.623.000 \times 100\%) - 97.096.874.442)}{(97.324.626.000 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$E = 0,21 \%$$

Tabel 16 Perhitungan Analisis Efisiensi

NO	SASARAN PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI
1	Optimalnya Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset di Bidang Perhubungan	351.113.688	347.686.191	0,21%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	29.581.618.812	29.388.010.515	
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	65.421.497.000	65.418.121.179	
Total		97.299.623.000	97.096.874.442	0,21%

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Badan Kebijakan Transportasi dalam rumus efisiensi adalah sebesar 0,21%.

3.2.4 ANALISIS KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

dimana:

K : Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan
 RAK : Realisasi Anggaran Kumulatif dengan Bulan i
 RPDK : Rencana Penarikan dana Kumulatif sampai dengan Bulan ke n
 n : Jumlah Bulan

Tabel 17 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran Tahun 2022

No.	Bulan	RPD Kumulatif (Rp.)	Realisasi Kumulatif (Rp.)	Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran (%)
1	Januari	3.928.962.913	3.318.525.252	84,463
2	Februari	8.277.108.304	7.129.617.789	86,137
3	Maret	15.604.066.719	13.999.610.997	89,718
4	April	24.861.442.643	23.661.634.292	95,174
5	Mei	32.672.271.160	31.148.055.069	95,335
6	Juni	41.472.322.565	40.298.109.702	97,169
7	Juli	50.585.425.779	49.633.500.787	98,118
8	Agustus	60.142.026.722	59.345.077.695	98,675
9	September	69.517.721.982	69.311.233.991	99,703
10	Oktober	78.738.583.208	78.518.344.242	99,720
11	November	87.948.474.592	86.861.858.383	98,764
12	Desember	97.299.623.000	97.096.874.442	99,792
Rata-Rata				95,231

Nilai Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi selama Tahun 2022 sebesar 95,231% yang berarti implementasi kinerja telah selaras dengan proses penganggaran pada penyusunan perjanjian kinerja revisi di Tahun 2022.

3.2.5 PENILAIAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN TINGKAT UNIT ESELON I

Dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Implementasi Badan Kebijakan Transportasi dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat unit Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

$$NKP = \frac{\text{Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat} + \text{rata-rata nilai satker}}{2}$$

Dimana:

NKP = Nilai Kinerja Tingkat Eselon I/program

Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%- 100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%- 100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Badan Kebijakan Transportasi dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

dimana:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi Badan Kebijakan Transportasi sebesar 1,01% maka nilai efisiensi Badan Kebijakan Transportasi yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{0,21\%}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50,525\%$$

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada Badan Kebijakan Transportasi.

Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CKP \text{ atau } CKK \times W_{CK}) + (NE \times W_E)$$

dimana:

NKI : Nilai Kinerja dan Aspek Implementasi

P : Penyerapan Anggaran

K : Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

NE : Nilai Efisiensi

W_P : Bobot Penyerapan Anggaran (9,7%)

W_K : Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (18,2%)

W_{CK} : Bobot Capaian Keluaran (43,5%)

W_E : Bobot Efisiensi (28,6%)

$$\begin{aligned} NKI &= (99,79 \times 9,7\%) + (95,231 \times 18,2\%) + (100 \times 43,5\%) + (50,525 \times 28,6\%) \\ &= 84,96\% \end{aligned}$$

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Badan Kebijakan Transportasi sebesar 84,96% dikategorikan Baik.

Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat

$$\text{Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat dan Implementasi} = (NKI \times W_I) + (CSP \times W_M)$$

Dimana:

NKI : Nilai Kinerja Atas Aspek Implementasi

CSP : Capaian Sasaran Program berdasarkan aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) sebesar 99,90

W_I : Bobot Aspek Implementasi (33,3%)

W_M : Bobot Aspek Manfaat (66,7%)

$$\begin{aligned} NKI &= (84,96 \times 33,33\%) + (99,90 \times 66,76\%) \\ &= 94,92\% \end{aligned}$$

Nilai Kinerja Atas Aspek Manfaat dan Implementasi Badan Kebijakan Transportasi sebesar 94,92% termasuk kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil hitungan di atas maka didapatkan hasil perhitungan Nilai Kinerja Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan rumus di bawah ini:

$$NKP = \frac{\text{Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat} + \text{rata - rata nilai satker}}{2}$$

Dimana:

NKP = Nilai Kinerja Tingkat Eselon I/ program

Rata-rata Nilai Kinerja Satker berdasarkan aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) sebesar 90,22.

$$NKA = \frac{94,92 + 85,53}{2} = 90,22\%$$

Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi sebesar 90,22% termasuk kategori Baik.

3.3 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA

3.3.1 PENYELESAIAN 11 (SEBELAS) ISU STRATEGIS

Pada tahun 2022, Badan Litbang Perhubungan bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Segala kegiatan yang berkaitan dengan riset dan penelitian telah beralih kepada BRIN. Selama masa transisi menuju Badan Kebijakan Transportasi, telah disusun dan disampaikan kepada Menteri Perhubungan sebanyak 44 rekomendasi kebijakan. Dari 44 rekomendasi kebijakan yang telah disusun, 6 diantaranya bidang sarana transportasi, 13 rekomendasi bidang prasarana dan integrasi moda, 17 rekomendasi bidang lalu lintas, angkutan, dan transportasi perkotaan, dan terdapat 8 rekomendasi kebijakan bidang keselamatan dan keamanan. Adapun judul dari rekomendasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Judul Rekomendasi Kebijakan

No	Pusat Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan
1.	Bidang Sarana Transportasi	• Supply Armada Pesawat Udara; • Program Subsidi dan Keperintisan; • Angkutan Pemandu Moda; • Pendanaan Alternatif LN; • Skema Pengusahaan Angkutan Umum; • Rekomendasi Penataan TERSUS/TUKS
2.	Bidang Prasarana	• Penetapan <i>Military Training Area</i> (MTA); • Optimalisasi Sumber Daya Airnav;

No	Pusat Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan
	Transportasi	• Dukungan Transportasi Udara untuk Ekspor perikanan; • Pemanfaatan <i>Sustainable Aviation Fuel</i> (SAF); • Optimalisasi Aset di Transportasi Udara; • Penetapan Kriteria <i>Mhulti-Airport System</i> (MAS); • Dukungan Transportasi Udara untuk pemulihan ekonomi; • Percepatan penyelesaian PSN; • Mitigasi Keterbatasan Supply Armada Pesawat Udara; • Pola Pengembangan Operasi HEMS di Indonesia; • Efisiensi Biaya Perusahaan Penerbangan; • Urgensi Implementasi Upset Prevention And Recovery Training (UPRT) dalam Mendukung Keselamatan Penerbangan; • Pola Pengembangan Kebijakan Jaringan.
3.	Bidang Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	• Pengendalian Pergerakan Orang (Lebaran & Nataru); • Sistem Transportasi IKN; • Jaringan dan Rute Penerbangan; • Angkutan Perkotaan Buy The Service (BTS); • Penyesuaian Harga Tiket Angkutan Udara; • Angkutan penyeberangan Merak Bakauheni; • Penghapusan Syarat Tes PCR/Antigen untuk Perjalanan Transportasi Udara; • Penyesuaian Tarif OJOL; • Penerapan <i>Weight In Motion</i> (WIM); • Penyusunan Tatravil; • Evaluasi Kebijakan <i>Red Zone Marking</i>; • Evaluasi Kebijakan Penanganan Terminal Bayangan; • Dukungan Perubahan Regulasi Transportasi Jalan; • Rekomendasi Kebijakan Tentang P3DN; • Kebijakan Kendaraan Listrik; • Rekomendasi Perumusan Kebijakan LRT; • Rekomendasi Kebijakan MRT.
4.	Bidang Keselamatan dan Keamanan	• Penetapan posisi Bandar udara IKN; • Pengawasan Kru Penerbangan; • Evaluasi IM.8 Tahun 2021 (Pelayanan Angkutan Penyebrangan); • Pariwisata yang berkeselamatan; • Optimalisasi Angkutan Pemadu Moda; • Evaluasi Efektivitas Pengoperasian Bus Feeder; • Solusi Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; • Strategi Skema Kebijakan Dalam Mendukung Implementasi <i>Green Logistic</i>.

3.3.2 HAK PATEN

Pada tahun 2022, publikasi melalui sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dapat dilaksanakan karena output HKI berasal dari hasil penelitian, sedangkan saat ini ada perubahan organisasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi yang memiliki output rekomendasi kebijakan yang artinya tidak dapat diajukan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Akan tetapi pada tahun 2022 terdapat pengajuan Hak Paten yang sedang dalam tahap proses pengajuan kepada instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditargetkan selesai pada akhir tahun.

Hak paten yang masih dalam tahap pengajuan antara lain:

1. Sistem Deteksi Genangan Air Pada Landasan Pacu Bandar Udara.
2. Metode Untuk Mendeteksi Genangan Air Pada Landasan Pacu Bandar Udara.
3. Kover Pelindung Detektor Genangan Air Pada Landasan Pacu Dengan Menggunakan Material Baja.
4. Kover Pelindung Detektor Genangan Air Pada Landasan Pacu Dengan Menggunakan Material Komposit.

3.3.3 PENGHARGAAN

Sebagai unit kerja pendukung kegiatan utama Badan Kebijakan Transportasi, sepanjang tahun 2022 Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi senantiasa berusaha memberikan dukungan layanan manajemen dan manajemen teknis lainnya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Beberapa capaian keberhasilan lainnya serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Kebijakan Transportasi di Tahun 2022 antara lain:

1. Juara II Lomba Konten UPT Kemenhub dengan tema “ASN Kemenhub Bangga Menggunakan Buatan Indonesia”

Dalam rangka mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Jambi Tahun 2022, membangun rasa cinta ASN Kementerian Perhubungan terhadap buatan Indonesia, mendorong aktivitas dan minat membaca juga partisipasi pada intraweb mitra, serta selaras dengan arahan Menko Marvest untuk melakukan aksi afirmatif penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Lomba Konten UPT Kemenhub melalui Intraweb mitra.dephub.go.id.

Sekretariat Badan Litbang Perhubungan ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba tersebut dan berhasil menjadi juara ke-2 dengan mengirimkan konten UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengangkat tema “Selasa di Kementerian Perhubungan”. Lomba tersebut diikuti oleh Humas Bagian Data Humas Publikasi dengan Penulis Artikel Prilla Kinantya, Pranata Humas Pertama Badan Litbang Perhubungan.



Gambar 15 Pemberian apresiasi pemenang Lomba oleh Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenkomarvest



Gambar 16 Piagam Penghargaan Juara ke-2 Lomba Konten UPT

3.3.4 KERJASAMA

Untuk menunjang penyusunan rekomendasi kebijakan, Badan Kebijakan Transportasi melakukan kerjasama dengan beberapa instansi. Hal tersebut dilakukan agar rekomendasi kebijakan yang dilakukan lebih tepat guna.

Tabel 19 Kerjasama Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

NO.	JUDUL MOU	INSTANSI	MASA BERLAKU	TINDAK LANJUT
1.	Kerja Sama Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan	Perum LPPNPI	2022-2027	Telah dilaksanakan rapat tindak lanjut penandatanganan MoU dan pembahasan isu strategis bidang navigasi penerbangan pada tanggal 25 – 26 Agustus dan 1 – 2 September 2022 (notulensi terlampir). Telah dirancang Perjanjian Kerja Sama antara divisi internal di Perum LPPNPI dengan Puslitbang Transportasi Udara, sebelum Badan Litbang Perhubungan bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi.
2.	Kerja Sama Analisis Teknis Bidang Pelayaran	PT. PAL	2002-2024	Direncanakan untuk pelaksanaan <i>focus group discussion</i> (FGD) untuk menindaklanjuti MoU yang telah disusun terkait dengan substansi teknis penerapan kewajiban <i>lashing</i> pada kendaraan diatas kapal penyeberangan.

3.3.5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2022

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Badan Kebijakan Transportasi, diadakan berbagai pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis dan manajerial. Berikut pendidikan dan pelatihan selama tahun 2022:

Tabel 20 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kebijakan Transportasi

NO.	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENYELENGGARA	JUMLAH PESERTA
1.	Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Kebijakan	a. Gelombang I (18—19 Jan 2022) b. Gelombang II (24—25 Jan 2022)	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	64 Peserta
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XCI	31 Januari – 24 Juni 2022	PPSDMAP	3 Peserta
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XCII	7 Februari – 1 Juli 2022	PPSDMAP	3 Peserta
4.	Pelatihan Manajemen Krisis Angkatan I	14—18 Februari 2022	PPSDMAP	3 Peserta
5.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XCIII	14 Februari – 8 Juli 2022	PPSDMAP	3 Peserta
6.	Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan	21—24 Februari 2022	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	31 Peserta
7.	Pelatihan Manajemen Talenta Angkatan I	21—25 Februari 2022	PPSDMAP	2 Peserta
8.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XCIV	21 Februari – 15 Juli 2022	PPSDMAP	2 Peserta
9.	Pelatihan SDM Pengelola Database	7—11 Maret 2022	PPSDMAP	5 Peserta
10.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan BLU	7—11 Maret 2022	PPSDMAP	1 Peserta
11.	Pelatihan <i>System Dynamic Modelling</i>	15—24 Maret 2022	Inspektorat Jenderal	11 Peserta
12.	Pelatihan Manajemen Resiko	21—25 Maret 2022	Inspektorat Jenderal	2 Peserta
13.	Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	22—24 Maret 2022	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	20 Peserta
14.	Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan	4—8 April 2022	PPSDMAP	2 Peserta

NO.	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENYELENGGARA	JUMLAH PESERTA
	Kompetensi Angkatan I			
15.	Pelatihan Manajemen Talenta Angkatan II	4—8 April 2022	PPSDMAP	1 Peserta
16.	Pelatihan Manajemen Kinerja	18—22 April 2022	PPSDMAP	1 Peserta
17.	Pelatihan Manajemen Krisis Angkatan II	18—22 April 2022	PPSDMAP	3 Peserta
18.	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis Bidang Perencanaan	17—19 Mei 2022	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	35 Peserta
19.	Pelatihan Public Speaking	6—10 Juni 2022	PPSDMAP	1 Peserta
20.	Pelatihan <i>Master of Ceremony</i>	6—10 Juni 2022	PPSDMAP	1 Peserta
21.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan II	6—10 Juni 2022	PPSDMAP	1 Peserta
22.	Pelatihan Pembangunan Karakter CPNS	13—17 Juni 2022	PPSDMAP	7 Peserta
23.	Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Angkatan II	20—24 Juni 2022	PPSDMAP	2 Peserta
24.	Pelatihan Bahasa Inggris Level Pelaksana	20—24 Juni 2022	PPSDMAP	1 Peserta
25.	Pelatihan Dasar CPNS	20 Juni – 24 November 2022	PPSDMAP	7 Peserta
26.	Bimbingan Teknis Fotografi	28 Juni – 1 Juli 2022	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	19 Peserta
27.	Pelatihan EDP Batch 4 Bappenas	11—22 Juli 2022	BAPPENAS	2 Peserta
28.	Pelatihan Kelayakan Proyek Bappenas	10—21 Oktober 2022	BAPPENAS	3 Peserta
29.	Pelatihan Rencana Strategis Angkatan III	21—25 November 2022	BAPPENAS	1 Peserta

3.3.6 FGD DAN WEBINAR

Selama tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi telah mengadakan webinar dan FGD (Forum Group Discussion) untuk menggali informasi sebagai bahan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi. Adapun webinar dan FGD yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Percepatan Penerapan Kebijakan Kendaraan Listrik

Pada 6 Oktober 2022, Badan Kebijakan Transportasi menggelar Webinar dengan tema “Upaya Percepatan Penerapan Kebijakan Kendaraan Listrik”. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa kehadiran kendaraan bermotor listrik di Indonesia bukan hanya akan membantu dari sisi lingkungan dengan mengurangi polusi udara, tapi secara langsung akan berpengaruh pada sektor ekonomi dan energi. Kementerian Perhubungan berkomitmen penuh mendukung kebijakan percepatan implementasi penggunaan kendaraan bermotor listrik, salah satunya adalah “Road Map Transformasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan operasional pemerintahan dan transportasi umum angkutan jalan Tahun 2021-2030”. Kepala Badan Kebijakan Transportasi menambahkan bahwa akan mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai angkutan umum dimana sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan akan terus mengawal setiap kebijakan transportasi dalam rangka mendukung Percepatan Penerapan Kebijakan Kendaraan Listrik serta mewujudkan kebijakan yang bersifat holistik, kolaboratif, integratif, tematik dan spasial baik pada tingkat direktif, strategi, taktikal, maupun operasional, sejalan dengan mandat dalam RPJMN 2020-2024.



Gambar 17 Webinar Upaya Percepatan Penerapan Kebijakan Kendaraan Listrik

2. Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Lalu Lintas Angkutan Perkotaan

Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan menggelar kegiatan diseminasi hasil analisis kebijakan tahun 2022 pada Jumat, 14 Oktober 2022. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi output kegiatan kepada stakeholders terkait tentang kegiatan analisis kebijakan yang telah selesai dilakukan. Dalam proses kajian pada tahun 2022, telah dihasilkan analisis kebijakan berupa 4 policy paper (Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2022, Analisis Kebijakan Terminal Bayangan, Analisis Kebijakan Marka Zona Berbahaya, dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan BTS), serta rekomendasi-rekomendasi terkait isu-isu yang mengemuka saat ini seperti rekomendasi Evaluasi Kebijakan Peningkatan Keselamatan Bus Pariwisata, Rekomendasi Kebijakan P3DN, Rekomendasi Kebijakan Penerapan Perangkat WIM, Rekomendasi Kebijakan Usulan Perubahan Regulasi Transportasi Jalan, Survey ATP/WTP Penyesuaian Tarif Ojol, Solusi Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika, menyampaikan bahwa esensi kegiatan diseminasi ini diharapkan hasil kebijakan yang ada dapat dipahami secara detail dan ditindaklanjuti hingga proses evaluasi secara komprehensif



Gambar 18 Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Lalu Lintas Angkutan Perkotaan

3. Keselamatan dan Keamanan Moda Darat dan Kereta Api Menuju Transportasi Maju

Pada tanggal 14 November 2022, Badan Kebijakan Transportasi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Review Sistem Keselamatan dan Keamanan Moda Darat dan Kereta Api Menuju Transportasi Maju. Salah satu tujuan pembangunan dan penyelenggaraan sektor transportasi adalah dengan tidak melupakan aspek krusial yaitu keselamatan dan keamanan. Hal ini juga tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan untuk menurunkan rasio kejadian kecelakaan transportasi per satu juta keberangkatan. Kepala Badan Kebijakan Transportasi menyampaikan bahwa untuk dapat menurunkan rasio kecelakaan, salah satu yang dapat diupayakan adalah dengan menyediakan sistem keselamatan dan keamanan yang dapat secara efektif menerapkan tindakan preventif terhadap terjadinya accident/incident dalam dunia transportasi. Karenanya butuh sistem kebijakan yang dapat mengintruksi dan mempengaruhi kondisi dari faktor penyebab kecelakaan. Sehingga dapat terwujud konsep “based on demand”, artinya output rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Kebijakan Transportasi merupakan

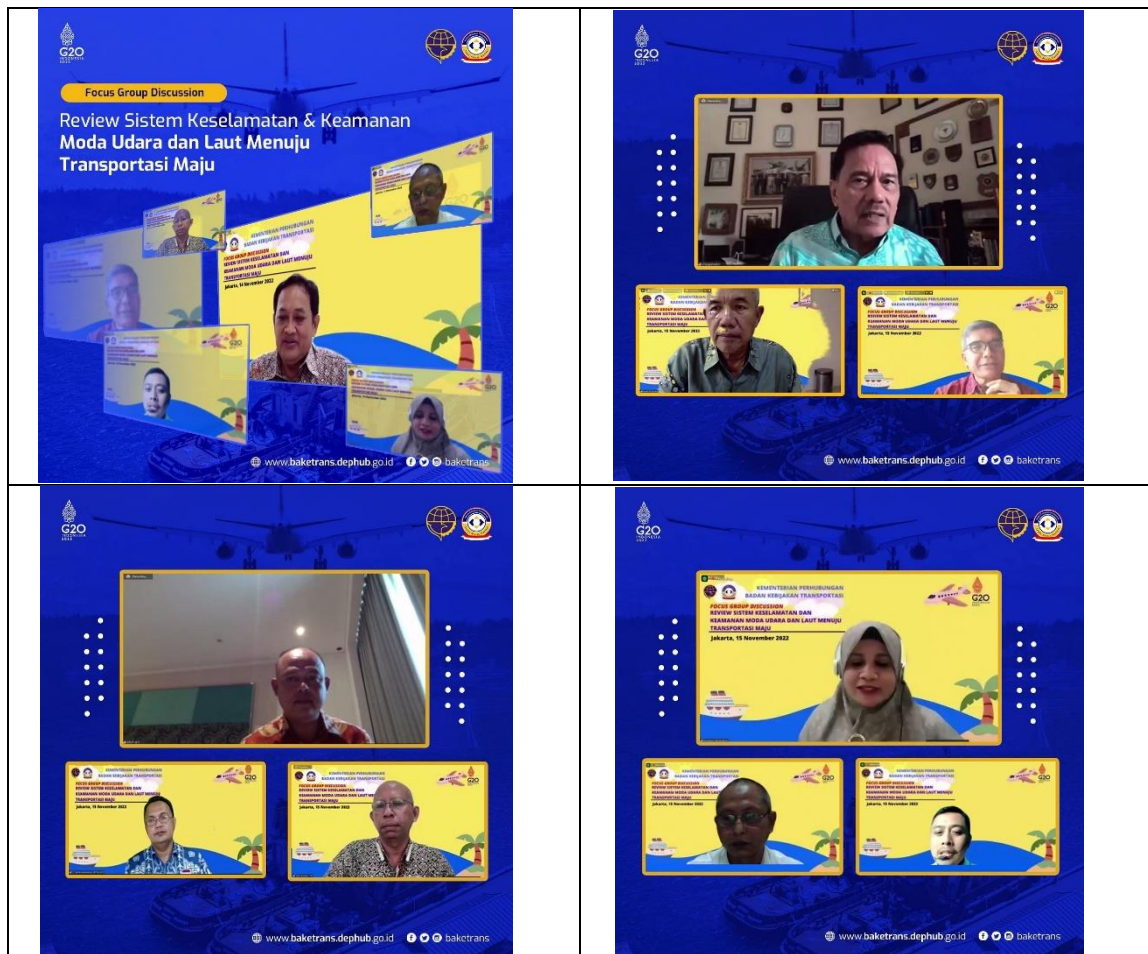
kebijakan yang benar-benar ditunggu dan dibutuhkan untuk mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman di masa mendatang.



Gambar 19 FGD Keselamatan dan Keamanan Moda Darat dan Kereta Api

4. Review Sistem Keselamatan dan Keamanan Moda Udara dan Laut Menuju Transportasi Maju

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) melalui Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) berjudul “Review Sistem Keselamatan dan Keamanan Moda Udara dan Laut Menuju Transportasi Maju” pada hari Selasa, 15 November 2022. Keselamatan dan keamanan adalah aspek yang penting dalam penyelenggaraan transportasi. Agar rasio kecelakaan dapat ditekan, perlu upaya untuk menyediakan sistem keselamatan dan keamanan sebagai bentuk tindakan preventif terhadap terjadinya kecelakaan. Kepala Baketrans menegaskan bahwa keselamatan adalah tugas semua pihak, terutama pemerintah selaku regulator. Tetapi, upaya yang dilakukan pemerintah juga harus didukung oleh semua operator transportasi dengan menjalankan ketentuan prosedur (SOP) yang berlaku. Karenanya, perlu sinergitas dari berbagai pihak agar dapat tercapai zero accident, mengingat keselamatan dan keamanan transportasi merupakan salah satu tujuan pembangunan sektor transportasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.



Gambar 20 Review Sistem Keselamatan dan Keamanan Moda Udara dan Laut Menuju Transportasi Maju

5. Penyusunan Perumusan Kebijakan Kereta Api Ringan atau Light Rail Train (LRT)

Pada tanggal 29 November 2022, Badan Kebijakan Transportasi melalui Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan menggelar FGD terkait penyusunan perumusan kebijakan kereta api ringan atau Light Rail Train (LRT). FGD ini digelar untuk melihat kesiapan operasional LRT Jabodebek dan juga menjangar perspektif dari para stakeholders terkait dalam operasional LRT ke depannya. Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan (LLATP), Eddy Gunawan menyampaikan bahwa saat ini LRT secara overall telah mencapai 92,59%, dengan rincian lintasan 1 Stasiun Cawang-Harjamukti sebesar 95,93%, lintasan 2 Stasiun Ciliwung-Dukuh Atas sebesar 92,1%, lintasan 3 Stasiun Halim-Jatimulya sebesar 90,94%. Kapsujuk LLATP juga menambahkan banyak yang perlu dicermati dalam aspek pelayanan dan keselamatan operasional LRT mengingat LRT menggunakan Grade of Automation (GoA) level 3, dimana LRT akan dijalankan driverless tanpa masinis. Secara garis besar arah rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan dalam pengoperasian LRT adalah terkait integrasi, layanan dan manajemen rekayasa lalu lintas LRT menjadi hal yang perlu diperhatikan seperti Pengendalian Lalu Lintas melalui TDM seperti Congestion Pricing, Park and Ride, Parking Policy. Selain itu rekayasa lalu lintas (transisi) pengalihan maupun pembatasan pergerakan di tiap koridor LRT akan sangat membantu occupancy rate LRT serta Konektivitas Feeder LRT Jabodetabek Lintas Pelayanan melalui kebijakan re-routing angkutan berbasis Bus.



Gambar 21 Penyusunan Kebijakan *Light Rapid Transit* (LRT)

6. Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar – Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivitas

Badan Kebijakan Transportasi gelar FGD “Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar – Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivitas” yang diselenggarakan pada Kamis, 1 Desember 2022. Focus Group Discussion ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Kebijakan Transportasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta para peneliti dari beberapa universitas terkemuka di Indonesia dan Australia yang tergabung dalam PAIR (The Partnership Australia Indonesia Research). Menhub menyampaikan bahwa upaya pemberdayaan potensi wilayah dan destinasi wisata diperlukan untuk mendukung keberlangsungan operasional kereta api sebagai moda transportasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil identifikasi awal pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare, terdapat potensi angkutan barang bersumber dari potensi pertanian, produksi semen, dan angkutan petikemas yang memungkinkan terdapat peralihan moda transportasi dari trucking beralih menggunakan kereta api. Menurut Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika, keberlangsungan operasional kereta api Makassar-Parepare ini tentunya perlu dijaga secara berkelanjutan dengan sasaran penumpang maupun barang



Gambar 22 Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar – Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivitas

7. Dryport to Dryport (DP2DP) Project Gerderland - West Java

Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan kawasan industri seperti menggunakan kapal tongkang dan kereta api untuk kelancaran angkutan logistik keluar dan menuju pelabuhan laut maupun pelabuhan daratan, serta kolaborasi antar pelabuhan seperti Pelabuhan Patimban dengan Pelabuhan Tanjung Priok dalam mendukung kegiatan logistik di Indonesia perlu dikembangkan. Untuk itu, Badan Kebijakan Transportasi berkolaborasi dengan Tim Peneliti Logistik dan dosen dari HAN University of Applied Sciences serta BINUS University menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (1/12), untuk melakukan investigasi pada sistem supply chain antara Indonesia dan Belanda menggunakan dryports. Melalui pembangunan dry port, diharapkan dapat meningkatkan aktifitas di pelabuhan yang memiliki tingkat BOR (Beuth Occupancy Ratio) atau tingkat penggunaan dermaga dan tingkat YOR (Yard Occupancy Ratio), sehingga dapat mempercepat waktu untuk melakukan aktifitas bongkar muat. Diselenggarakannya FGD ini pun menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan efisiensi logistik yang berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak dalam memaksimalkan potensi yang ada.



Gambar 23 FGD Dryport to Dryport (DP2DP) Project Gerderland

8. Seamless Connectivity dan Land Value Capture dalam Mendukung Pengoperasian Kereta Cepat Manfaat untuk Negeri

Badan Kebijakan Transportasi bersama dengan Ditjen Perkeretaapian menggelar FGD yang bertajuk Seamless Connectivity dan Land Value Capture dalam Mendukung Pengoperasian Kereta Cepat Manfaat Untuk Negeri. Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berjalan dengan berpijak pada Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan momentum dalam mewujudkan transportasi publik yang modern dengan diiringi pemanfaatan dan memaksimalkan wilayah-wilayah yang dilalui jalur tersebut dimana memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dalam sambutannya, Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Gede Pasek Suardika, menyampaikan bahwa keberlangsungan operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung dengan pemberdayaan potensi wilayah dan destinasi wisata yang berpotensi menjadi pusat bangkitan dan tarikan baru. Selain itu "Seamless Connectivity" menjadi hal yang utama dalam pengoperasian Kereta Jakarta-Bandung dimana harus memiliki kesetaraan dalam integrasi, konektivitas, aksesibilitas dan pelayanannya bagi semua pihak. Membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat di dalamnya agar pengoperasian KCJB berjalan optimal dan

membawa manfaat menumbuhkan nilai sosial ekonomi di wilayah sekitar.

Turut hadir sebagai pembicara, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat, Erni Basri, Pemerhati Transportasi, Djoko Setiowarno, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Tatan Rustandi, dan Assoc. Professor SAPPK ITB, Ibnu Syabri. Hadir sebagai penanggap Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, Dirut Utama KCIC, Dwiwana Slamet Riyadi, Guru Besar ITB, Harun Al Rasyid. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar, Aris Budiman.



Gambar 24 FGD Seamless Connectivity dan Land Value Capture dalam Mendukung Pengoperasian Kereta Cepat Manfaat untuk Negeri

3.4 ANALISIS CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2022

3.4.1 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Kondisi perkembangan pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 21 Perkembangan Pagu Anggaran 2020-2022

TAHUN	2020	2021	2022
Target	157.347.081.193	140.998.851.000	97.299.623.000
Realisasi	155.490.975.066	139.578.138.938	97.096.874.442
Sisa Anggaran	1.856.106.127	1.420.712.062	202.748.558
Daya Serap	98,82%	98,99%	99,79%

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Kebijakan Transportasi, 2022

Berdasarkan data perkembangan pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi selama dua tahun terakhir, terlihat pagu anggaran cenderung mengalami penurunan pada tahun 2022 dikarenakan adanya optimalisasi anggaran.

3.4.2 ANALISIS DANA YANG TIDAK TERSERAP TAHUN 2022

Capaian daya serap anggaran Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022 tercatat sebesar 99,79% atau Rp97.096.874.442,00. Sisa anggaran yang tidak terserap dari pagu akhir adalah sebesar Rp202.748.558,00 (0,21%). Nilai persentase daya serap tersebut menunjukkan secara keseluruhan penyerapan anggaran sudah sangat baik. Adapun *output* secara fisik yang dihasilkan rata-rata sebesar 100% untuk semua kegiatan.

Realisasi daya serap Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022 per-jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 22 Capaian Daya Serap Per-Jenis Belanja Tahun 2022

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
Belanja Pegawai	30.945.758.000	30.944.134.813	99,99
Belanja Barang	63.782.782.000	63.583.402.841	99,69
Belanja Modal	2.571.083.000	2.569.336.788	99,93
TOTAL	97.299.623.000	97.096.874.442	99,79

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Badan Kebijakan Transportasi. 2022

Berdasarkan tabel tersebut, pagu tidak terserap paling kecil berasal dari Belanja Pegawai, yaitu sebesar 0,01% atau Rp1.623.187,00 dari pagu sebesar Rp30.945.758.000,00. Dengan diviasi sebesar 0,01%, hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran sudah sangat baik, dan juga dapat disimpulkan bahwa besaran target dan realisasi tidak cenderung sama.

Belanja Barang yang terserap dengan baik sebesar 99,69% dari pagu sebesar Rp63.782.782.000,00 dikarenakan anggaran dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Adapun sisa anggaran Belanja Barang, yaitu 0,31% berasal dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja barang operasional, dan belanja barang non-operasional.

Begitu pula dengan Belanja Modal terserap baik dengan daya serap sebesar 99,93% atau terserap sebesar Rp2.569.336.788,00 dari pagu Rp2.571.083.000,00. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengadaan sarana dan prasarana dapat direalisasikan sesuai dengan rencana setelah revisi anggaran.

Berdasarkan data capaian daya serap per-program kegiatan Badan Kebijakan Transportasi (tingkat Eselon II). Realisasi tertinggi untuk Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 99,99% dan terendah pada kegiatan di Pusat Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Transportasi sebesar 98,67%.

Data rinci capaian daya serap kegiatan Badan Kebijakan Transportasi berdasarkan program kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23 Capaian Daya Serap Per-Program Kegiatan Tahun 2022

No.	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1	Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	65.421.497.000	65.418.121.179	99,99
2	Pusat Kebijakan Sarana	8.056.823.000	8.028.773.168	99,65
3	Pusat Kebijakan Prasarana dan Integrasi Moda	7.143.056.000	7.119.120.494	99,66
4	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan	9.352.995.000	9.302.710.721	99,46
5	Pusat Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Transportasi	7.325.252.000	7.228.148.880	98,67
TOTAL		97.299.623.000	97.096.874.442	99,79

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Kebijakan Transportasi. 2022

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2022:

- 1) Komitmen Bersama Pimpinan dan Seluruh Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja anggaran;
- 2) Melakukan optimalisasi anggaran;
- 3) Mengawal ketat rencana penarikan dana sesuai jadwal;
- 4) Melakukan rapat evaluasi anggaran secara berkala;
- 5) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi pembayaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Secara umum, pencapaian kinerja Badan Kebijakan Transportasi pada Tahun 2022 baik, dikarenakan Sasaran Program (SP) telah tercapai melalui Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana ditargetkan dalam dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari IKP yang dapat dihitung, diperoleh capaian kinerja Badan kebijakan Transportasi Tahun 2022 sebesar **122,839%**. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja Badan Kebijakan Transportasi telah mencapai target.
2. Sasaran Program 1 Badan Kebijakan Transportasi telah tercapai, khususnya di IKP 1 *intermediate outcome* dan IKP 3 *intermediate outcome*. Adapun untuk IKP yang lain pada SP.1 tidak dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan kegiatan penelitian telah beralih ke BRIN.
3. Sasaran Program 2 Badan Kebijakan Transportasi telah tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2022 diperoleh nilai yang lebih rendah, hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan rutin yang berkaitan dengan penelitian sudah tidak dapat dilaksanakan. Kedepan, IKP ini tidak dapat dicantumkan dalam RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi, dikarenakan adanya perubahan proses bisnis yang semula berorientasi hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan.
4. Sedangkan Sasaran Program 3, Target Indeks RB tahun 2022 sebesar 79,5 dengan realisasi Indeks RB tahun 2021 yaitu 79,20, jika dibandingkan dengan target indeks RB Tahun 2021 maka realisasi indeks RB Tahun 2021 sama dengan target, sedangkan jika dibandingkan dengan target indeks RB Tahun 2022 maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,623 %. Saat ini, indeks RB Tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PANRB dan hasil indeks RB tersebut baru akan disampaikan pada tahun 2023 sehingga sampai untuk sementara nilai capaian kinerja indeks RB menggunakan capaian indeks RB tahun sebelumnya.
5. Dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja Badan Kebijakan Transportasi pada Tahun 2022, telah terealisasi anggaran sebesar **99,97%** atau senilai Rp97.096.874.442,00 dari pagu senilai Rp97.299.623.000,00.
6. Nilai Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi selama Tahun 2022 sebesar 95,231% yang berarti implementasi kinerja telah selaras dengan proses penganggaran pada penyusunan perjanjian kinerja revisi di Tahun 2022.
7. Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Badan Kebijakan Transportasi sebesar 84,96% dikategorikan Baik. Sedangkan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi sebesar 90,22% termasuk kategori Baik.

Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja, berikut adalah pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi pada Triwulan IV TA 2022:

Tabel 24 Pencapaian Sasaran Program Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022

KODE IKP	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
IKP 1	<i>Initial Outcome</i>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	80	N/A	N/A
	<i>Intermediate Outcome</i>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	37	44,118	119,237
IKP 2	<i>Initial Outcome</i>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	%	80	N/A	N/A
	<i>Intermediate Outcome</i>	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	%	30	N/A	N/A
IKP 3	<i>Initial Outcome</i>	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	80	N/A	N/A
	<i>Intermediate Outcome</i>	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan pendanaan dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	32	50	156,25
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 1: Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan						137,743
IKP 4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis dan rekomendasi kebijakan transportasi		%	85	98,810	116,246

KODE IKP	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub Dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi					116,246
IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	79,5	79,2*	99,623
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					99,623
Capaian Kinerja Badan Kebijakan Transportasi					122,839

**Nilai Indeks RB Kemenhub TA 2021, sedangkan nilai RB Kemenhub TA 2022 sedang proses penilaian KemenpanRB*

4.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada Tahun 2022, Badan Kebijakan Transportasi secara dinamis telah melakukan perbaikan dengan mengedepankan koordinasi yang baik antar seluruh unit kerja. Beberapa identifikasi perbaikan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung ketercapaian target PK tahunan diusulkan Indikator Indeks RB menggunakan hasil Penilaian Mandiri Pada 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yang mendukung ketercapaian target Indeks RB Kementerian Perhubungan. Sementara untuk Indeks RB Kemhub diusulkan ada pada Indikator Tingkat Kementerian dengan menggunakan Penilaian dari Kemenpan-RB;
2. Cascading indikator kinerja program dari tingkat Eselon I sampai dengan indikator kinerja individu yang telah disusun, perlu dilakukan penetapan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PER IKP DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		Target PK (%)	Target Volume	Realisasi Kinerja Desember 2022	Capaian terhadap PK 2022	Pagu Anggaran 2022	Target Anggaran Desember 2021	Realisasi Anggaran Desember 2022	Capaian Realisasi Anggaran thd Pagu Anggaran
SP.1. Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset di Bidang Perhubungan									
INITIAL OUTCOME									
IKP 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
3	Puslitbang Transportasi LSDP	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
4	Puslitbang Transportasi Udara	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		Target PK (%)	Target Volume	Realisasi Kinerja Desember 2022	Capaian terhadap PK 2022	Pagu Anggaran 2022	Target Anggaran Desember 2021	Realisasi Anggaran Desember 2022	Capaian Realisasi Anggaran thd Pagu Anggaran
INTERMEDIATE OUTCOME									
IKP 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	37,000	34,000	15,000	119,237	1.945.393.500,000	1.945.393.500,000	1.943.056.557,000	99,880
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda	37,000	8,000	3,000	101,351	57.818.500,000	57.818.500,000	57.154.141,000	98,851
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	37,000	13,000	5,000	103,950	991.117.000,000	991.117.000,000	991.599.356,000	100,049
3	Puslitbang Transportasi LSDP	37,000	5,000	3,000	162,162	200.000.000,000	200.000.000,000	200.000.000,000	100,000
4	Puslitbang Transportasi Udara	37,000	8,000	4,000	135,135	696.458.000,000	696.458.000,000	694.303.060,000	99,691
INITIAL OUTCOME									
IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		Target PK (%)	Target Volume	Realisasi Kinerja Desember 2022	Capaian terhadap PK 2022	Pagu Anggaran 2022	Target Anggaran Desember 2021	Realisasi Anggaran Desember 2022	Capaian Realisasi Anggaran thd Pagu Anggaran
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
3	Puslitbang Transportasi LSDP	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
4	Puslitbang Transportasi Udara	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
INTERMEDIATE OUTCOME									
IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	30,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda	30,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	30,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
3	Puslitbang Transportasi LSDP	30,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
4	Puslitbang Transportasi Udara	30,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	
INITIAL OUTCOME									

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		Target PK (%)	Target Volume	Realisasi Kinerja Desember 2022	Capaian terhadap PK 2022	Pagu Anggaran 2022	Target Anggaran Desember 2021	Realisasi Anggaran Desember 2022	Capaian Realisasi Anggaran thd Pagu Anggaran
IKP 3	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	1 Puslitbang Transportasi Antarmoda	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	2 Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	3 Puslitbang Transportasi LSDP	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	4 Puslitbang Transportasi Udara	80,000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
INTERMEDIATE OUTCOME									
IKP 3	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan	32,000	24,000	12,000	156,250	351.113.688,000	351.113.688,000	347.686.191,000	99,024

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		Target PK (%)	Target Volume	Realisasi Kinerja Desember 2022	Capaian terhadap PK 2022	Pagu Anggaran 2022	Target Anggaran Desember 2021	Realisasi Anggaran Desember 2022	Capaian Realisasi Anggaran thd Pagu Anggaran
	dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)								
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda	32,000	11,000	7,000	198,864	57.818.500,000	57.818.500,000	57.154.141,000	98,851
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	32,000	3,000	1,000	104,167	190.880.188,000	190.880.188,000	190.880.188,000	
3	Puslitbang Transportasi LSDP	32,000	2,000	1,000	156,250	102.415.000,000	102.415.000,000	99.651.862,000	97,302
4	Puslitbang Transportasi Udara	32,000	8,000	3,000	117,188	-	-	-	
SP.2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi									
IKP 4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	85,000	168,000	166,000	116,246	29.581.618.812,000	29.581.618.812,000	29.388.010.515,000	99,346
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda	85,000	47,000	48,000	120,150	7.209.615.000,000	7.209.615.000,000	7.113.840.598,000	98,672

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		Target PK (%)	Target Volume	Realisasi Kinerja Desember 2022	Capaian terhadap PK 2022	Pagu Anggaran 2022	Target Anggaran Desember 2021	Realisasi Anggaran Desember 2022	Capaian Realisasi Anggaran thd Pagu Anggaran
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	85,000	53,000	51,000	113,208	8.170.997.812,000	8.170.997.812,000	8.120.231.177,000	99,379
3	Puslitbang Transportasi LSDP	85,000	36,000	35,000	114,379	7.754.408.000,000	7.754.408.000,000	7.729.121.306,000	99,674
4	Puslitbang Transportasi Udara	85,000	32,000	32,000	117,647	6.446.598.000,000	6.446.598.000,000	6.424.817.434,000	99,662
SP.3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	79,500		79,200	99,623	65.421.497.000,000	65.421.497.000,000	65.418.121.179,000	99,995
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					122,839	97.299.623.000,000	97.299.623.000,000	97.096.874.442,000	99,792

LAMPIRAN 2. DAFTAR KAJIAN YANG TERMANFAATKAN SESUAI IKP 1 INTERMEDIATE OUTCOME

No	Pusat Kebijakan	Judul Kajian	Stakeholder	Surat Ke Stakeholder Terkait (No Surat & Tanggal)	Kemanfaatan
1	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Studi Desain Kapal Negara	KPLP	LT.202/1/7/BLTL/2022 Tanggal 27 April 2022 surat kepada Direktur KPLP Dirjen HUBLA dan Surat Balasan Direktur KPLP No KU.001/4/2/DJPL/2022 Tanggal 11 Mei 2022 tentang pemanfaatan studi desain kapal negara.	Sebagai acuan dalam pembangunan Kapal Patroli Kelas I oleh KPLP. Sampai dengan Triwulan III, telah dilaksanakan rapat pembahasan rencana tindak lanjut studi Desain Kapal Negara bersama KPLP dengan mengundang PT. Darma Kreasi Nusantara selaku konsultan penyusun studi. KPLP saat ini dalam proses pengusulan pembangunan kapal. Secara detail, kegiatan yang telah dilakukan yaitu: a. Koodinasi melalui surat terkait kemanfaatan studi, sebagai tindak lanjut undangan dari KPLP terkait studi Desain Kapal Negara; b. Rapat pembahasan tindak lanjut studi dan rencana pembangunan kapal patrol; c. Koordinasi dan komunikasi melalui surat terkait kebutuhan updating spesifikasi teknis kapal; d. Keikutsertaan Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam acara Stakeholders Workshop pada tanggal 14 – 17 Juni 2022 untuk pembahasan Pembangunan Kapal Kelas 1 oleh KPLP.

No	Pusat Kebijakan	Judul Kajian	Stakeholder	Surat Ke Stakeholder Terkait (No Surat & Tanggal)	Kemanfaatan
2	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Study Potensi Pengoperasian Wing In Ground (WIG) craft untuk menunjang pariwisata	Institute Teknologi Sepuluh November (ITS)	Berdasarkan Nota dinas Kapuslitbang TLSDP Tanggal 27 Juli 2022 tentang Notulensi Rapat Pembahasan Potensi Pengoperasian Wing in Ground (WIG) untuk menunjang Pariwisata Pada Tanggal 22 Juli 2022 di Surabaya sesuai ST.82 Tahun 2022 Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi LSDP	Menjadi bahan literatur atau referensi untuk jurusan Teknik Kelautan dalam pembelajaran berkaitan tekno-ekonomi serta studi lainnya terkait tata Kelola, proses bisnis, dan uji layanan transportasi.
3	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Study potensi pengoperasian Bus Tanah Air Indonesia Untuk Keperintisan dan Pariwisata	Institute Teknologi Sepuluh November (ITS)	Berdasarkan Nota dinas Kapuslitbang TLSDP Tanggal 27 Juli 2022 tentang Notulensi Rapat Pembahasan Potensi Pengoperasian Bus Tanah Air untuk menunjang Keperintisan dan Pariwisata Pada Tanggal 22 Juli 2022 di Surabaya sesuai ST.82 Tahun 2022 Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi LSDP	Menjadi bahan literatur atau referensi untuk jurusan Teknik Kelautan dalam pembelajaran berkaitan tekno-ekonomi serta studi lainnya terkait tata Kelola, proses bisnis, dan uji layanan transportasi.

No	Pusat Kebijakan	Judul Kajian	Stakeholder	Surat Ke Stakeholder Terkait (No Surat & Tanggal)	Kemanfaatan
4	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Studi Harmonisasi ATFM dan ACDM Guna Kelancaran Layanan Penerbangan di Ruang Udara dan Bandara	Airnav	LT.404/3/5-BLTU-2020 (29 September 2020)	Harmonisasi ATFM dan ACDM memiliki fungsi sebagai bentuk mitigasi jika terdapat kendala di ruang udara dan bandara. Studi yang dilakukan sebelumnya mengambil lokus Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan saat ini sedang terus dilakukan penyempurnaan beberapa sistem karena masih ditemui kendala teknis baik dari sisi Airline, Angkasa Pura, maupun Airnav. Kegiatan koordinasi dan monitoring implementasi terhadap pemanfaatan hasil studi telah dilakukan pada tanggal 29 – 31 Agustus 2022.
5	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Mitigasi Dampak Lingkungan Akibat Operasi Bandar Udara dan Pengaruh Lingkungan Terhadap Operasi Bandar Udara	Angkasa Pura I	KP 49 TAHUN 2020 (16 Oktober 2020)	Sebagai bentuk tindak lanjut dari kajian yang dilakukan oleh Pusat Litbang Transportasi Udara, Angkasa Pura I telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diimplementasikan dalam laporan RKL-RPL di 15 bandara sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki masing-masing bandara dan dilakukan pula pelaporan kepada instansi lingkungan hidup dan instansi pengelola transportasi (Ditjen Perhubungan Udara) setiap semester. Selain itu, Angkasa Pura I juga telah melakukan penyusunan kajian rona awal Bandara Bali Utara pada tahun 2021 sebagai baseline untuk mengetahui kondisi lingkungan sebelum adanya aktivitas

No	Pusat Kebijakan	Judul Kajian	Stakeholder	Surat Ke Stakeholder Terkait (No Surat & Tanggal)	Kemanfaatan
					pembangunan dan pengoperasian bandara.
6	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Pengujian Keandalan dan Pemanfaatan Lanjut Purwarupa <i>Standing Water Detector</i> dan <i>Wind Shear Detector</i>	Angkasa Pura I (Bandara YIA)	UM.002/1/5/BLTU/2022 (25 Januari 2022)	Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan sedang dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pendaftaran hak paten, dan alat yang diciptakan bersama dengan Perguruan Tinggi Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut telah dilakukan uji coba dan digunakan di Bandara Yogyakarta Internasional Airport.
7	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Pengembangan <i>Anti Bird Strike</i> yang Efektif untuk Bandar Udara di Indonesia	KLHK	UM.209/1/9-BLTU-2020 (26 November 2020)	Sedang ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU di Tahun 2022 (menunggu pelantikan Dirjen Perhubungan Udara)
8	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal di Kawasan Perkotaan Bali Selatan	BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Bali	LT.106/1/21/BLTJKA/2022 28 Juni 2022	Memberikan rekomendasi moda alternatif berupa trase LRT untuk kawasan perkotaan di Bali Selatan dan juga rekomendasi terkait aspek finansial dan ekonomi

No	Pusat Kebijakan	Judul Kajian	Stakeholder	Surat Ke Stakeholder Terkait (No Surat & Tanggal)	Kemanfaatan
9	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Potensi Pemudik Angkutan Lebaran Tahun 2020	- Direktorat Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Komisi V DPR RI	LT.106/1/21/BLTJKA/2022 28 Juni 2022	Sebagai bahan rapat Kajian Potensi Pemudik Angkutan Lebaran Tahun 2020 oleh Komisi V DPR RI
10	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Perencanaan Implementasi Teknologi Angkutan Umum Autonom Berbasis Energi Listrik di Wilayah IKN	- Direktorat Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - PT. Aulia Sakti Internasional	LT.106/1/21/BLTJKA/2022 28 Juni 2022	Sebagai bentuk tindak lanjut dari kajian yang dilakukan oleh Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, sebagai bahan literatur atau referensi Perencanaan Implementasi Teknologi Angkutan Umum Autonom Berbasis Energi Listrik di Wilayah IKN
11	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Kajian Kebijakan Lalulintas dan Penataan Kawasan Puncak	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)	LT.106/1/21/BLTJKA/2022 28 Juni 2022	Tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian bahwasanya dokumen penelitian digunakan sebagai rekomendasi Kebijakan Lalu Lintas dan Penataan Kawasan Puncak dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan PM Nomor 84 Tahun 2021
12	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan	Studi Pengembangan Prototipe Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Penyusunan Desain)	Masyarakat Transportasi Indonesia	LT.106/1/21/BLTJKA/2022 28 Juni 2022	Menjadi bahan literatur atau referensi Pengembangan Prototipe Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Penyusunan Desain)

No	Pusat Kebijakan	Judul Kajian	Stakeholder	Surat Ke Stakeholder Terkait (No Surat & Tanggal)	Kemanfaatan
13	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Penyusunan Legalitas Masterplan Transportasi Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara	Tempo Media	Redaktur Pelaksana Tempo Media Nomor Surat 096/SK-KT/IIII/2021 tanggal 09 Maret 2021	Progres kemanfaatan rekomendasi kebijakan bidang Transportasi Antarmoda telah menunjukkan progres yang cukup baik dimana Penyusunan Legalitas Masterplan Transportasi Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara telah dimanfaatkan oleh Tempo Media dengan Nomor Surat 096/SK-KT/IIII/2021 tanggal 09 Maret 2021 perihal permintaan dokumen studi terkait Pulau Lembeh yang telah dilaksanakan oleh Puslitbang Transportasi Antarmoda. Dokumen studi tersebut akan digunakan untuk melakukan reportase terkait pengembangan kawasan ekonomi khusus serta rencana pembangunan infrastruktur transportasi yang menunjang pembangunan kawasan KEK Bitung dan pengembangan KEK Likupang di Sulawesi Utara. Namun terkait anggaran belum dapat terlaksana karena masih terdapat blokir anggaran dikarenakan reformasi lembaga litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi dan pemindahan anggaran ke BRIN.
14	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Standardisasi Desain dan Kinerja Integrasi Simpul Transportasi	PT ASDP (Persero)	General Manager ASDP Indonesia Ferry Nomor : UM.0009/09/09/ASDP.com/2022 tanggal 19 Agustus 2022	Pengembangan fasilitas pendukung alih moda yang sesuai standar sehingga dapat memberikan kenyamanan pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan

No	Pusat Kebijakan	Judul Kajian	Stakeholder	<i>Surat Ke Stakeholder Terkait (No Surat & Tanggal)</i>	Kemanfaatan
15	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pengembangan Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transport System)	Dinas Perhubungan D.I. Yogyakarta	Tanda Terima Kepada Kepala Seksi Teknologi Transportasi Dishub DIY Pada Tanggal 9 Februari 2021	Untuk bahan pertimbangan penyusunan kegiatan pengembangan teknologi transportasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

LAMPIRAN 3. DAFTAR KAJIAN YANG TERMANFAATKAN SESUAI IKP 3 INTERMEDIATE OUTCOME

NO	PUSAT KEBIJAKAN	JUDUL PENELITIAN	STAKEHOLDER	SURAT KE STAKEHOLDER TERKAIT (NO SURAT & TANGGAL)	KEMANFAATAN
1	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Efektivitas Pengaturan Shift Jam Kerja Terhadap Pola Perjalanan Transportasi di Jabodetabek	Kementerian Perhubungan	Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 4 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020	Sebagai acuan penyusunan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 4 tahun 2020 tentang tindak lanjut pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid 19) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun terkait anggaran belum dapat terlaksana karena masih terdapat blokir anggaran dikarenakan reformasi lembaga litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi dan pemindahan anggaran ke BRIN.
2	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pola Perjalanan Masyarakat di Wilayah Jabodetabek Sebelum Pandemi, Periode PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru	Kementerian Perhubungan	Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 4 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020	Sebagai acuan penyusunan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 4 tahun 2020 tentang tindak lanjut pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid 19) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Namun terkait anggaran belum dapat terlaksana karena masih terdapat blokir anggaran dikarenakan reformasi lembaga litbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi dan pemindahan anggaran ke BRIN.
3	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Kesiapan Konektivitas Antarmoda Dalam Menghadapi Adaptasi Baru yang Efektif dan Aman	PT ASDP (Persero)	General Manager ASDP Indonesia Ferry Nomor : UM.0009/09/09/ASDP.com/2022 tanggal 19 Agustus 2022	Pengembangan fasilitas pendukung alih moda untuk menghadapi adaptasi baru yang efektif dan aman di Pelabuhan Penyeberangan Merak

NO	PUSAT KEBIJAKAN	JUDUL PENELITIAN	STAKEHOLDER	SURAT KE STAKEHOLDER TERKAIT (NO SURAT & TANGGAL)	KEMANFAATAN
4	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Evaluasi Integrasi Fasilitas Alih Moda Pada Simpul Transportasi di Perkotaan Yogyakarta	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Surat Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Giwangan Nomor: LT.201/1/1/GIW 2022 tanggal 31 Agustus 2022	Saat ini telah dilakukan persiapan revitalisasi pada Terminal Giwangan untuk mendukung pengembangan integrasi fasilitas alih moda di perkotaan Yogyakarta.
5	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Evaluasi Integrasi Sistem Angkutan Umum Perkotaan untuk Meningkatkan Peran Perkeretaapian di Kawasan Bandung Raya	Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor :4502/HUB.05.03.02/Bid. Perkeretaapian Penting tanggal 29 Agustus 2022	Telah ditindaklanjuti dengan pembangunan Double Track Kiaracondong – Haurpugur, pembangunan Fly Over dan Underpass di 3 perlintasan sebidang yaitu Jl. Nurtanio Kota Bandung, Jl. Sriwijaya dan Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi. Adapun rencana peningkatan kelas dan elektrifikasi pada KRD Bandung – Padalarang sebagai feeder KCJB di Stasiun Padalarang, dan beberapa pengembangan untuk mendukung integrasi system angkutan umum perkotaan di Kawasan bandung Raya.
6	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pelayanan Penumpang di Propinsi Bali (Studi Kadus Terminal Mengwi Kabupaten Badung)	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Surat Kepala BPTD Wiayah XII Provinsi Bali dan Provinsi NTB Nomor: LT. 106/1/1/BPTD-XII/2022 tanggal 8 Agustus 2022	Menunjang konsep Transit Oriented Development pada kawasan mengwi dan terminal sebagai pusat TOD dengan menyusun Masterplan Pengembangan TOD Mengwi Tahun 2021 dan adanya kegiatan rehabilitasi terminal tipe A Mengwi tahun anggaran 2020 dan 2021, untuk pengembangan fasilitas integrasi moda di terminal.
7	Pusat Kebijakan Keselamatan	Peningkatan Konektivitas Antarmoda di Wakatobi	Badan Pengembangan Infrastruktur	Kepala Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III	dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR dengan nomor

NO	PUSAT KEBIJAKAN	JUDUL PENELITIAN	STAKEHOLDER	SURAT KE STAKEHOLDER TERKAIT (NO SURAT & TANGGAL)	KEMANFAATAN
	dan Keamanan Transportasi		Wilayah Kementerian PUPR	Nomor : PA 0107.wk/278 tanggal 1 November 2021	surat PA 0107-WK/278 sebagai bahan acuan dalam penyusunan <i>Integrated Tourism Master Plan</i> (ITMP) Wakatobi
8	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	Potensi Pengembangan <i>Traffic Separation Scheme</i> (TSS) di Teluk Balikpapan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Nota Dinas Nomor 22/BLTL/VI/2022 Tentang Penyampaian Notulensi Rapat Evaluasi Kemanfaatan Potensi Pengembangan TSS Balikpapan yang dilaksanakan Berdasarkan Undangan Rapat Nomor UM.207/1/24/BLTL/2022 Tanggal 19 Mei 2022	- Sebagai masukan dalam pengembangan dan penetapan alur di Teluk Balikpapan; - Pada Triwulan III Tahun 2022 telah dilaksanakan rapat pembahasan rencana tindak lanjut studi Potensi Pengembangan <i>Traffic Separation Schemes</i> (TSS) di Teluk Balikpapan dengan mengundang Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Balikpapan dan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Balikpapan.
9	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan	Evaluasi Integrasi Jaringan Prasarana, Layanan Perkotaan di Kota Yogyakarta, Kota Solo, dan Perjalanan Antar Kota Yogyakarta – Solo.	- Dinas Perhubungan Provinsi D.I Yogyakarta - Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I Yogyakarta	LT.106/2/8/BLTJKA/2022 24 Oktober 2022	- Pemerintah DIY sedang merencanakan satu platform layanan digital transportasi salah satunya gojek dengan membuat program first mile last mile guna memudahkan orang dalam melakukan perjalanan baik angkutan umum atau online taksi; - Bulan oktober tahun 2022 telah dilakukan koordinasi dengan aplikasi gojek dengan PT. AMI selaku operator Layanan Angkutan Transjogja untuk melakukan kolaborasi dalam memberikan pelayanan first mile last mile; - Pemerintah DIY, PT. AMI selaku operator transjogja dan PT. KCI selaku

NO	PUSAT KEBIJAKAN	JUDUL PENELITIAN	STAKEHOLDER	SURAT KE STAKEHOLDER TERKAIT (NO SURAT & TANGGAL)	KEMANFAATAN
					operator Commutter Line melakukan Perjanjian Kerjasama tentang integrasi system pembayaran dimana pemilik kartu KMR dapat menggunakan layanan transjogja.
10	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Harmonisasi <i>Waterbase Airport</i> dan Kebutuhan Wisata Kepulauan	Pemerintah Daerah	KP 20N Tahun 2020 (29 Januari 2020)	Sebagai dasar penyusunan detail teknis pembangunan waterbase di daerah (telah dijadikan referensi oleh Bappenas dan beberapa Pemerintah Daerah)
11	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Kesiapan Indonesia Dalam Implementasi Pelatihan Berbasis Upset Prevention and Recovery Training (UPRT)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1. UM.006/15/09/BKT/2022, 2. UM.207/21/14/PPSDMPU-2022	Menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti oleh BPSDM dalam menyusun kurikulum dan DKUPPU dalam menetapkan regulasi-regulasi serta evaluasi terhadap kesiapan sarana prasarana terkait. Puslitbang Transportasi Udara telah diundang menjadi narasumber dalam rapat dan FGD yang diadakan oleh kedua institusi tersebut, dimana keduanya tengah menyiapkan kebijakan implementasi UPRT ini di Indonesia

NO	PUSAT KEBIJAKAN	JUDUL PENELITIAN	STAKEHOLDER	SURAT KE STAKEHOLDER TERKAIT (NO SURAT & TANGGAL)	KEMANFAATAN
12	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	Standar Kesehatan di Sarana dan Prasarana Transportasi Udara dalam Antisiapsi Penyebaran Pandemi COVID-19	Kementerian Perhubungan	1. UM.006/04/03/BLT/2022 (7 MARET 2022) 2. UM.006/11/11-BLT-2020 (20 OKTOBER 2020) 3. LT.104/2/16-BLTU 2020	Studi ini menjadi rujukan dalam penerbitan Surat Edaran Menteri Perhubungan mengenai pembatasan perjalanan terutama di bidang transportasi udara. Namun terkait anggaran belum dapat terlaksana dikarenakan terdapat blokir dan pemindahan ke BRIN sejalan dengan adanya transformasi Balitbang menjadi Badan Kebijakan Transportasi

LAMPIRAN 4. SURAT PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
Call Center : +62.81311111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home Page : www.dephub.go.id

Nomor : KP. 904/2/3 Pnb 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Kementerian Perhubungan

Jakarta, 15 Juni 2022

Kepada Yth.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
C.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan
di
Jakarta

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bersama ini disampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 pada Kementerian Perhubungan beserta bukti dukung. Proses PMPRB tersebut telah dilaksanakan melalui pembahasan bersama dengan asesor, telah direviu oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, dan telah disetujui oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional dapat melakukan reviu atas penilaian tersebut. Lembar Kerja PMPRB Kementerian Perhubungan secara lengkap dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/PMPRB_KEMENHUB22.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,


 Novie Riyanto Rahardjo
 NIP. 19661111 199503 1 001



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Ketua Tim Evaluasi Kementerian PANRB.

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44316 DEPHUB IA
FAX :

BERITA ACARA
SUBMIT PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2022
Nomor: BA-ITBEN 7 Tahun 2022

Pada hari ini **Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** secara luring di Ruang Rapat Brawijaya Gedung Karsa Lantai 6 dan secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting (Meeting ID : 346 990 3159), telah dilakukan kegiatan Submit Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Perhubungan Tahun 2022.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dan yang hadir dalam kegiatan dimaksud sesuai dengan pengisian daftar hadir terlampir (peserta secara luring mengisi absensi fisik dan peserta secara daring mengisi absensi melalui [link https://rapat.dephub.go.id/c/WZP5K](https://rapat.dephub.go.id/c/WZP5K)), menyepakati konsensus akhir PMPRB Tahun 2022 dan Rencana Aksi sebagai berikut:

1. Nilai PMPRB Kemenhub 2022:

Penilaian		Bobot	Nilai		Indeks
			Pusat	Unit	RB
A.	PENGUNGKIT	60,00	59,09	13,20	52,44
I.	PEMENUHAN (20)	20,00	18,97	13,82	18,86
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00	1,89	1,96	1,92
	2. DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00	1,50	0,83	1,54
	3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3,00	3,00	1,97	2,99
	4. PENATAAN TATALAKSANA	2,50	2,27	0,89	2,23
	5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	3,00	3,00	1,35	2,97
	6. PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50	2,50	2,50	2,50
	7. PENGUATAN PENGAWASAN	2,50	2,44	2,06	2,39
	8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50	2,37	2,26	2,32
II.	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)	10,00	6,92	0,00	6,92
III.	REFORM (30)	30,00	26,88	19,38	26,65
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	3,00	2,70	2,91	2,81
	2. DEREGULASI KEBIJAKAN	3,00	2,50	1,54	2,52
	3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4,50	4,13	1,50	4,13
	4. PENATAAN TATALAKSANA	3,75	3,59	3,37	3,48
	5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	4,50	3,76	1,64	3,60

1

Penilaian		Bobot	Nilai		Indeks RB	
			Pusat	Unit		
	6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75	3,16	2,98	3,07
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	3,75	3,29	1,94	3,41
	8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75	3,75	3,54	3,64
TOTAL PENGUNGKIT			60,00	52,77	33,20	52,44

Penilaian		Bobot	Nilai		Indeks RB
			Pusat	Unit	
B.	HASIL (40)				
	1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)	10,00	8,40		8,40
	i. Opini BPK (3)	3,00	3,00		3,00
	ii. Nilai SAKIP (7)	7,00	5,40		5,40
	2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10,00	9,10		9,10
	- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	10,00	9,10		9,10
	3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)	10,00	8,50		8,50
	- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10,00	8,50		8,50
	4 KINERJA ORGANISASI (10)	10,00	8,04		8,04
	i. Capaian Kinerja	5,00	3,79		3,79
	ii. Kinerja Lainnya	2,00	1,50		1,50
	iii. Survei Internal Organisasi	3,00	2,75		2,75
TOTAL HASIL		40,00	34,04		34,04
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		100,00	86,81	33,20	86,48

2. Rencana Aksi Area Perubahan

NO	RENCANA AKSI
1	Manajemen Perubahan a. Penetapan, monitoring dan evaluasi program percepatan (Quick wins) Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2022; b. Pembentukan, monitoring dan evaluasi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan tahun 2022; c. Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024; d. Sosialisasi dan Internalisasi Core Values ASN BERAKHLAK

2

NO	RENCANA AKSI
2	Deregulasi Kebijakan a. Mengidentifikasi dan memetakan terhadap kebijakan yang tidak harmonis yang akan direvisi atau dihapus di lingkungan Kementerian Perhubungan b. Melakukan revisi terhadap kebijakan yang tidak harmonis, tidak sinkron dan bersifat menghambat c. Melakukan penyesuaian peraturan yang ada (Permenhub) dengan 5 (lima) Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Ciptaker di bidang perhubungan
3	Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Organisasi berbasis kinerja terkait dengan penyederhanaan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
4	Penataan Tata Laksana a. Penyediaan <i>Enterprise Service Bus</i> yang digunakan sebagai <i>gateway</i> integrasi aplikasi di internal dan eksternal Kemenhub; b. Menyediakan <i>Dashboard</i> Strategis yang berbasis <i>bigdata</i> untuk dapat melakukan prediksi sektor transportasi
5	Penataan Sistem Manajemen SDM a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN berbasis Human Capital Development Plan (HCDP); b. Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem teknologi melalui aplikasi SIAP JABAT
6	Penguatan Akuntabilitas a. Percepatan pengembangan <i>Integrated Planning System</i>; b. Penyempurnaan indikator kinerja organisasi dan kinerja individu; c. Integrasi aplikasi monitoring capaian kinerja organisasi dan individu
7	Penguatan Pengawasan a. Penguatan Unit Kepetuhan Internal sebagai <i>second line of defence</i>; b. Penerapan Manajemen Risiko di lingkup Kementerian Perhubungan.
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. Melakukan review dan perbaikan standar pelayanan dengan melibatkan masing-masing <i>stakeholders</i>; b. Publikasi dokumen standar pelayanan dan penyusunan database standar pelayanan; c. Melakukan pelatihan kompetensi/sosialisasi pelayanan prima kepada petugas layanan di setiap UPT;

3

NO	RENCANA AKSI
	d. Menerapkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pemberian layanan dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar; e. Mempermudah akses informasi tentang pelayanan secara online dan terhubung dengan sistem pelayanan publik; f. Melakukan inovasi pelayanan dengan menerapkan teknologi informasi; g. Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan; h. Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan keluhan/masukkan dan konsultasi secara berkala; i. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh unit pelayanan publik serta melakukan publikasi dan tindak lanjut hasil survei

3. Catatan Pelaksanaan Submit PMPRB dan Tindak Lanjut:

a. Catatan

- 1) Nilai aspek hasil antara area perubahan pada komponen pengungkit dan nilai pada komponen hasil menggunakan nilai capaian tahun 2021. Nilai indeks kualitas kebijakan pada hasil antara area perubahan merupakan nilai asumsi, karena belum ada penilaian dari instansi (Kementerian/ Lembaga) pembina.
- 2) Data dan isian pada Lembar Kerja PMPRB masih sebatas kondisi saat ini dan memungkinkan adanya pergerakan data.
- 3) Sehubungan aplikasi PMPRB Online Kementerian PAN dan RB yang saat ini masih dalam masa pengembangan, maka penyampaian PMPRB tahun 2022 dilakukan dengan mengirimkan softcopy Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta link bukti dukung melalui bit.ly/SubmitPMPRB2022.

b. Tindak Lanjut

- 1) Pelaksanaan rencana kerja dan update data dukung Lembar Kerja PMPRB dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional.
- 2) Penyampaian PMPRB disertai dengan surat penyampaian PMPRB yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal kepada Kementerian PAN dan RB/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa proses PMPRB telah direvisi oleh Inspektur Jenderal.

4

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

SEKRETARIS JENDERAL
Selaku Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Kementerian Perhubungan


NOVIE RIYANTO RAHARDJO
NIP. 19661111 199503 1 001

INSPEKTUR JENDERAL
Selaku Koordinator PMPRB
Kementerian Perhubungan


GEĐE PASEK SUARDIKA
NIP. 19630717 198903 1 002

5

LAMPIRAN 5. RENCANA AKSI PADA 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2022

NO	AREA PERUBAHAN	Kegiatan 2021-2022	Rencana Aksi
1.	Area manajemen Perubahan	1. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor Tentang tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 2. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor Tentang tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Litbang Perhubungan Tahun 2022 3. Melaksanakan Rapat pembahasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Litbang serta mengikuti Rapat pembahasa Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenhub Tahun 2021 dan 2022 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 6. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tentang Pembentukan Agen Perubahan di Lingkungan Badan Penelitian dan pengembangan Perhubungan tahun 2021 7. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tentang Pembentukan quickwins di lingkungan Badan penelitian pengembangan Perhubungan tahun 2021 8. Usulan Agen Perubahan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 Nomor UM.006/4/20- BLT-2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan Kementerian Perhubungan Tahun 2021 9. Konsep Usulan agen perubahan tahun 2022 10. Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, melalui rapat staf intern yang dipimpin Kepala Badan Litbang Perhubungan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional, sosialisasi reformasi birokrasi, Pelaksanaan Apel pagi setiap hari baik secara langsung maupun menggunakan teknologi selama masa Pandemi Covid-19, kegiatan keagamaan, Pelaksanaan Rapid Tes Covid-19, Pembuatan dan pendistribusian buku saku kode etik pegawai, Penetapan kawasan tanpa rokok, Pembuatan Kantin Kejujuran, pemasangan banner program reformasibirokrasi, pemasangan spanduk, dan melui media sosial (IG dan twiter).	1. Memperkuat peran Agen Perubahan yang tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu membangun social control di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas

NO	AREA PERUBAHAN	Kegiatan 2021-2022	Rencana Aksi
2.	Deregulasi Kebijakan	1. Kajian ulang undang-undang No23 tahun 2007 tentang perkerataapian terhadap skema penyelenggaraan kelembagaan dan teknologi 2. Kajian pengaturan atas pengoperasian waterbased dan sea plane di Indonesia (RPP) 3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak	Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk pelaksanaan Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Indentifikasi Jabatan Struktural (Jabatan Administrator) yang akan diusulkan pada struktur organisasi baru melslui Surat Sekretrais Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.105/1/1-BLT-2021 tanggal 8 Januari 2021 2. Penyempurnaan Organisasi Tata Kerja (OTK) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melalui Surat Sekretaris Badan Litbang Perhubungan Nomor UM.006/5/20-BLT-2021 tanggal 7 April 2021	1. Penataan Organisasi dan Tata Kerja BKT sebagai hasil reorganisasi Balitbang 2. Penguatan fungsi BKT sebagai unit kerja pelaksana analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang transportasi
4.	Penataan Tatalaksana	1. PM Perhubungan Nomor 82 Tahun 2017 trentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian PerhubunganPM Perhubungan Nomor 82 Tahun 2017 trentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan 2. Matrik Identifikasi SOP Sesuai dengan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan, 3. SOP 2021, 2022 4. SOP Revisi 2021, 2022 5. Printscreen AP2KP 6. Printscreen SIK 7. Printscreen Layanan Badan Litbang Perhubungan pada website Badan Litbang Perhubngan https://balitbanghub.dephub.go.id/ yaitu pelayanan: data, perpustakaan, jurnal penelitian, e-survey, Informasi (PPID, Renstra, Lakip, Kegiatan, peraturan, KSP, HAKI) 8. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 dan 2022 9. SK layanan Contack Center 2021, 2022 10. SK PPID 2021 dan 2022	1. Penyusunan Peta Proses Bisnis sesuai dengan Organisasi Badan Kebijakan Transportasi

NO	AREA PERUBAHAN	Kegiatan 2021-2022	Rencana Aksi
		11. Prinsreen Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan (Update) 12. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan PPID tahun 2020-2021 13. Laporan Pengelolaan website Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2021 14. Laporan CC Tahun 2020-2021	
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Dokumen Analisis Jabatan 2. Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat Badan Litbang Pehubungan tahun 2019 3. Identifikasi pelaksanaan Diklat di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 dan 2022 4. SKP Pegawai Badan Litbang Perhubungan 2021 dan 2022 5. PK Pejabat Struktural tahun 2021 dan 2022 6. Laporan Bulanan Pegawai Badan Litbang Perhubungan berdasarkan AP2KP 2021 dan 2022 7. Monitoring kinerja pegawai bulanan tahun 2020 dan 2021 8. Rekap pembayaran tunjangan tahun 2021 dan 2022 9. Pemberian reward kepada pegawai 2021-2022 10. Apel Pagi Badan Litbang Perhubungan setiap hari Senin-Kamis (foto apel) 11. Rekap Absensi Pelaksanaan Apel Pagi 12. Laporan Kepatuhan pelaksanaan Apel; 13. Laporan penegakan disiplin 14. Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan 15. Konsep penyusunan cascading indikator kinerja sampai level pelaksana 16. Usulan Mutasi/Promosi Jabatan Berdasarkan hasil Assesment, sengan mencantumkan hasil assesment dalam usulan jabatan, Surat Usulan Jabatan di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021-2022 17. Usulan Mutasi/Promosi Jabatan Berdasarkan hasil Assesment, sengan mencantumkan hasil assesment dalam usulan jabatan, Surat Usulan Jabatan di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021	Penyelesaian Penyusunan Kinerja seluruh Pegawai berdasarkan Permenpan Terbaru

NO	AREA PERUBAHAN	Kegiatan 2021-2022	Rencana Aksi
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. SK Tim Penyusun Renstra Balitbanghub 2020-2024 2. Konsep penyelarasan (cascade) sasaran dan indikator kinerja Balitbanghub 3. Dokumentasi Rapat Penyusunan Renstra Balitbanghub 2020-2024 4. Dokumentasi Rapat Penyusunan Renstra BKT 2020-2024 5. Dokumen konsep Renstra Balitbanghub 2020-2024 6. Dokumen konsep Renstra BKT 2020-2024 7. SK Tim Penyusun PK Balitbanghub Tahun 2021 dan 2022 8. Rapat Penyusunan PK Balitbanghub 2021 dan 2022 (Absensi, Risalah Rapat, Dokumentasi/Foto) 9. Paraf Relasi Persetujuan Pimpinan atas PK Balitbanghub 2021 dan 2022 10. Dokumen PK Balitbanghub 2021 dan 2021 11. Printscreen Login e-Performance sebagai Pimpinan unit kerja 12. Persetujuan masing-masing pimpinan unit kerja atas pencapaian target di LKIP 13. Pemantauan pelaksanaan pengisian aplikasi e-Performance unit kerja 14. Rapat terkait pemantauan E-performance (Undangan, Absensi, Risalah, Dokumentasi (foto/video/audio)) 2020 15. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan-an; - Balitbang Tw III & IV 2021 - Setbadan Tw III & IV 2021 - Puslitbang TAM Tw III & IV 2021 - Puslitbang JAKA Tw III & IV 2021 - Puslitbang LSDP Tw III & IV 2021 - Puslitbang Udara Tw III & IV 2021 16. Penilaian Pimpinan atas AP2KP bawahan 17. Login e-Performance sebagai Pimpinan unit kerja 18. Penyusunan bahan progres pembangunan 19. Bimtek e-Performance 2020 20. Bimtek PK dan LKIP kepada unit kerja Eselon II Badan Litbang Phb 2021/2022 21. Bimtek e-SAKIP 2021/2022 22. Rencana bimtek penyusunan dokumen SAKIP unit eselon I Tahun 2021/2022 23. Lakip Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 24. Data Refocusing Kegiatan Pencegahan atau Penyebaran Covid-19 25. Pengesahan Revisi Anggaran 2022	Penyusunan Dokumen Perencanaan BKT sebagai hasil reorganisasi Bdan Litbang

NO	AREA PERUBAHAN	Kegiatan 2021-2022	Rencana Aksi
		26. Pagu Anggaran Badan Litbang Setelah Pemotongan 2022 27. Refocussing 2022 28. SK Kepala Badan Litbang Perhubungan tentang reward di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Peta Strategis Renstra 2020-2024	
7.	Penguatan Pengawasan	1. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021-2022 (Surat Keputusan, Laporan bulanan, surat pernyataan, sosialisasi, public campaign) 2. SK Kepala Badan Litbang Perhubungan Tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021/2022 3. Laporan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan I, II, III dan IV Badan Litbang Perhubungan Tahun 2021 dan 2022 4. Laporan Unit pengendalian Gratifikasi Semester I dan II Badan Litbang Perhubungan tahun 2021/2022 5. Surat Tugas yang mencantumkan tidak menerima Gratifikasi tahun 2021 dan 2022 6. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan tahun 2021 dan 2022 7. Penandatanganan Surat Pernyataan Gratifikasi periode 1 Juli s.d 31 Desember 2021 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaduan UPG 9. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UPG di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan 10. Penyusunan kegiatan SPIP (menuju level 4) serta hasil monitoring dan Evaluasi/Lapora SPIP 11. Konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPI 12. Laporan CC151 tahun 2020 dan 2021 13. Mendukung kegiatan Whistle Blowing System (sosialisasi, Public campaign) 14. Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan (System (sosialisasi, Public campaign, monitoring dan Evaluasi/laporan berkala) 15. Perolehan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi kepada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan tahun 2020 16. Penyampaian LHKPN dan LHKASN 100%	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

NO	AREA PERUBAHAN	Kegiatan 2021-2022	Rencana Aksi
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Standar Pelayanan Publikasi Karya Tulis Ilmiah (KTI) Warta Penelitian Perhubungan melalui Open Journal System (OJS) Badan Litbang Perhubungan Nomor IP.103/1/1-BLT- 2019 tanggal 21 Mei 2019 2. Sistem Manajemen Iso 9001:2015 Perpustakaan Badan Litbang Perhubungan dan Warta Penelitian Perhubungan. 3. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian 4. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 Puslitbang Transportasi Antarmoda 5. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 Puslitbang Transportasi Udara 6. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 Puslitbang Transportasi LDSP 7. SK Kepala Badan Litbang Perhubungan tentang Pengajuan Jurnal Penelitian secara online melalui Open Journal System Nomor SK.61 Tahun 2019 8. SK Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.22 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang pengaduan masyarakat @balitbanghub151 9. Media informasi meluli PPID, Media sosial Instagram, twiter, youtube @balitbanghub151, knowledge sharing program 10. Media pengaduan melalui website (www.balitbanghub.dephub.go.id); media social instagram, twitter @balitbanghub151 11. Laporan Monitoring Pengaduan CC Tahun 2021 12. IPK dan IKM Badan Litbang Perhubungan 13. Printscreen Layanan Badan Litbang Perhubungan pada website Badan Litbang Perhubngan https://balitbanghub.dephub.go.id/ yaitu pelayanan: data, perpustakaan, jurnal penelitian, e-survey, Informasi (PPID, Renstra, Lakip, Kegiatan, peraturan, KSP, HAKI) 14. TOR dan RAB OJS 2023 15. TOR dan RAB Warta Penelitian 2023	1. Melaksanakan Survey IPK dan IKM di Lingkungan Badan kebijakan Transportasi 2. Inventarisasi layanan unggulan Badan Kebijakan Transportasi (BKT)

